

TA/TL/2020/ 1228

TUGAS AKHIR
PERBANDINGAN PROGRAM SANITASI PADA
TAHAP PASCA KONSTRUKSI IPAL KOMUNAL DI
KABUPATEN SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA

Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Derajat Sarjana (S1) Teknik Lingkungan



Alifia Farah Pramudita
16513113

PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

TUGAS AKHIR
PERBANDINGAN PROGRAM SANITASI PADA
TAHAP PASCA KONSTRUKSI IPAL KOMUNAL DI
KABUPATEN SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA

Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Derajat Sarjana (S1) Teknik Lingkungan

Disusun Oleh:

Alifia Farah Pramudita
16513113

Disetujui,

Dosen Pembimbing:


Dr. Andik Yulianto, S.T., M.T

NIK. 155131313

Tanggal: 22 Oktober 2020


Noviani Ima Wantoputri, S.T., M.T

NIK. 195130102

Tanggal: 22 Oktober 2020

Mengetahui,

Ketua Prodi Teknik Lingkungan FTSP UII


Eko Siswovo, ST., M.Sc.ES., Ph.D.

NIK. 025100406.

Tanggal: 27 Oktober 2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PERBANDINGAN PROGRAM SANITASI PADA
TAHAP PASCA KONSTRUKSI IPAL KOMUNAL DI
KABUPATEN SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA**

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji

Hari: Senin

Tanggal: 27 Oktober 2020



Tim Penguji:

Dr. Andik Yulianto, S.T., M.T.

()

Noviani Ima Wantoputri, S.T., M.T.

()

Dr. Eng. Awaluddin Nurmiyanto, S.T., M.Eng.

()

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun, baik di Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama penulis dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Program software komputer yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya, bukan tanggungjawab Universitas Islam Indonesia.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dengan pencabutan gelar yang sudah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Yogyakarta, 15 September 2020

Yang membuat pernyataan,



Alifia Farah Pramudita

NIM: 16513113

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis telah diberi kemampuan untuk menyelesaikan penulisan laporan Tugas Akhir tentang Perbandingan Program Sanitasi Pada Tahap Pasca Konstruksi IPAL Komunal Di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

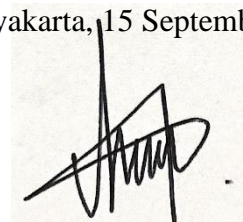
Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memenuhi syarat akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik bagi Mahasiswa Program S1 Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan laporan ini penulis banyak mendapatkan semangat, dukungan, dorongan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan kesehatan dan rezeki sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini. Kepada orangtua dan keluarga serta orang terdekat penulis yang selalu mendoakan, membantu dan menyemangati. Juga kepada dosen pembimbing dan teman-teman penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi menyempurnakan laporan ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan dapat ditindaklanjuti dengan pengimplementasian saran.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 15 September 2020



Alifia Farah Pramudita

ABSTRAK

ALIFIA FARAH PRAMUDITA. Perbandingan Program Sanitasi Pada Tahap Pasca Konstruksi IPAL Komunal Di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Dibimbing oleh Dr. ANDIK YULIANTO, S.T., M.T dan NOVIANI IMA WANTOPUTRI, S.T., M.T.

Sebagai upaya untuk mencapai akses sanitasi layak, dengan meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, pemerintah membuat program pembangunan sanitasi berbasis masyarakat. Kabupaten Sleman menjadi salah satu wilayah diselenggarakannya program dari pemerintah ini. Empat program pengadaan IPAL Komunal di Kabupaten Sleman yaitu SANIMAS, USRI, DAK dan SLBM. Meski pembangunan telah selesai, hal tersebut tidak menjamin sarana tersebut berjalan dengan baik tahapan pasca konstruksi. Mengingat program pengadaan IPAL Komunal berbeda, tentu memiliki kekurangan yang berbeda pula. Untuk mengetahui hal ini maka dilakukan evaluasi berdasarkan aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan program sanitasi pada tahap pasca konstruksi IPAL Komunal, mencakup aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan berdasarkan program pengadaannya di Kabupaten Sleman menggunakan metode *scoring* dan pembobotan. Dalam penelitian ini pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan program pengadaannya. Untuk setiap IPAL Komunal ada 1 orang responden, selain itu pada tahap ini juga dilakukan studi literatur untuk memperoleh data peraturan atau ketentuan pelaksanaan sebagai acuan dalam mengevaluasi. Dengan kedua tahapan diatas dinilai dapat mewakili kondisi keseluruhan masing-masing IPAL Komunal. Berdasarkan hasil analisis data, Program SANIMAS dan Program DAK mendapatkan nilai yang rendah pada aspek peran pemerintah daerah, ini dibuktikan dengan tidak adanya bantuan fasilitas maupun pendanaan dari pemerintah. Program USRI pada aspek kelembagaan pengelola dinilai kurang karena IPAL Nologaten jumlah pengelolanya belum memenuhi ketentuan. Sedangkan Program SLBM dalam aspek kelembagaan pengelola dan kinerja pengelola dinilai masih kurang, karena IPAL Ambarketawang tidak menyimpan dokumentasi IPAL Komunal dan tidak memiliki SOP pemeliharaan serta pengelola belum paham mengenai TUPOKSI sebagai pengurus.

Kata Kunci: IPAL Komunal, Kelembagaan Pengelola, Program IPAL, Peran Pemerintah

ABSTRACT

ALIFIA FARAH PRAMUDITA. *Comparison of the Program of Sanitation after Construction in Sleman Regency, D.I. Yogyakarta. Supervised by Dr. ANDIK YULIANTO, S.T., M.T and NOVIANI IMA WANTOPUTRI, S.T., M.T.*

To reach a worthy sanitation access by improving the contribution for fulfilling sanitation access to public, the government establish the program of community-oriented sanitation development. Sleman becomes one of the areas where these programs are conducted. Four programs of communal WWTP (Wastewater Treatment Plant) in Sleman are SANIMAS, USRI, DAK and SLBM. Even though the construction has been completed, the facility will not automatically run well after construction. Considering the difference of communal WWTP procurement program, it certainly has different drawbacks. To see this, evaluation needs to be conducted. The research aims at comparing the result of the evaluation on communal WWTP after construction, including site operators, performance quality, the role of local government and financial based on the program of the construction in Sleman using scoring and weighting methods. The choice of research location is based on the program of the construction. Literature review is also conducted to find data of regulation or the rule of application as a reference for evaluation. The mentioned two steps are considered to represent the condition of each communal WWTP. Data analysis show that the programs of SANIMAS and DAK got low scores in the aspect of the role of local government, being proved by the absence of facilities and budgeting from the government. The program of USRI in the aspect of site operators scores low because in Nologaten the number of the staff has not met the provisions. The program of SLBM in the aspect of site operators and the performance quality of the operators are considered as low in the score because Ambarketawang doesn't have recorded document of communal WWTP and doesn't have SOP of maintenance and the operators do not understand their duties and responsibilities.

Keywords: *Communal WWTP, Government role, Site Operators, WWTP Program*

DAFTAR ISI

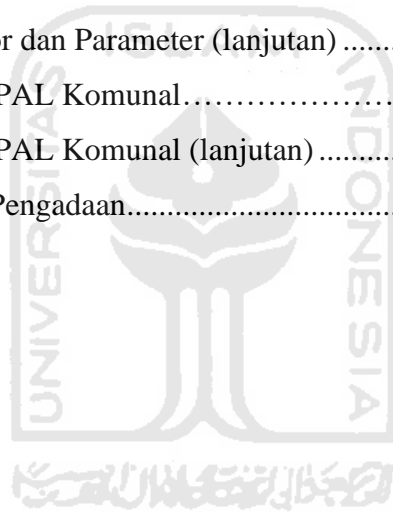
TUGAS AKHIR.....	i
PERNYATAAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Ruang Lingkup.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Sanitasi di Kabupaten Sleman.....	17
2.2 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.....	18
2.3 Peraturan Tentang Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).....	18
2.4 Program Pengadaan IPAL Komunal.....	19
2.5 Tahap Pasca Konstruksi.....	24
2.6 AKSANSI.....	26
2.7 Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Metode Penelitian.....	29
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Pengumpulan Data.....	32
3.4 Prosedur Analisis Data.....	32
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	37

4.1	Permasalahan IPAL Komunal di Kabupaten Sleman.....	37
4.2	Perbandingan Evaluasi Aspek Kelembagaan Pengelola, Kinerja Pengelola Berdasarkan Pengetahuan TUPOKSI, Peran Pemerintah Daerah dan Keuangan..	39
4.3	Perbandingan Hasil Evaluasi IPAL Komunal	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN		78
RIWAYAT HIDUP.....		86



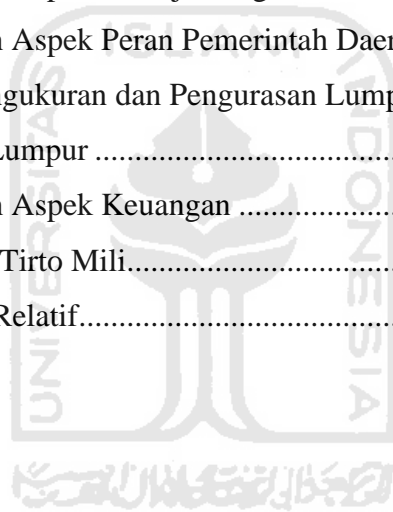
DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Prinsip Program Pengadaan IPAL Komunal	23
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 2. 3 Pembobotan Evaluasi.....	36
Tabel 2. 4 Pembobotan Aspek dalam Penelitian.....	36
Tabel 3. 1 Daftar Lokasi Penelitian.....	31
Tabel 3. 1 Daftar Lokasi Penelitian (lanjutan)	32
Tabel 3. 2 Aspek, Indikator dan Parameter.....	33
Tabel 3. 2 Aspek, Indikator dan Parameter (lanjutan)	35
Tabel 4. 1 Permasalahan IPAL Komunal.....	37
Tabel 4. 1 Permasalahan IPAL Komunal (lanjutan)	58
Tabel 4. 2 Nilai Program Pengadaan.....	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian	29
Gambar 3. 2 Diagram Alir Pembuatan Instrumen	30
Gambar 3. 3 Gambar Titik Lokasi Penelitian	31
Gambar 4. 1 Perbandingan Aspek Kelembagaan Pengelola.....	40
Gambar 4. 2 Contoh Bagan Struktur Pengelola.....	40
Gambar 4. 3 SOP Pemeliharaan IPAL Mendiro	44
Gambar 4. 4 Perbandingan Aspek Kinerja Pengelola.....	45
Gambar 4. 5 Perbandingan Aspek Peran Pemerintah Daerah.....	48
Gambar 4. 6 Pelatihan Pengukuran dan Pengurusan Lumpur yang Benar	49
Gambar 4. 7 Penyedotan Lumpur	51
Gambar 4. 8 Perbandingan Aspek Keuangan	52
Gambar 4. 9 Penambahan Tirta Mili.....	53
Gambar 4. 10 Total Nilai Relatif.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 : Titik Lokasi Penelitian
- Lampiran 3 : Penilaian IPAL Komunal Tiap Indikator
- Lampiran 4 : Profil IPAL Komunal



DAFTAR SINGKATAN

AD	: Anggaran Dasar
ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
AKSANSI	: Asosiasi KSM/KPP Sanitasi Seluruh Indonesia
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ART	: Rumah Tangga
BOD	: <i>Biochemical Oxygen Demand</i>
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
COD	: <i>Chemical Oxygen Demand</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DED	: Detail Engineering Design
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
KPP	: Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
Pemda	: Pemerintah Daerah
PU	: Pekerjaan Umum
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RKM	: Rencana Kerja Masyarakat)
RT	: Rukun Tetangga
SANIMAS	: Sanitasi Berbasis Masyarakat
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SLBM	: Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SPALD	: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
SPALD-S	: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat
TFL	: Tenaga Fasilitator Lapangan
TUPOKSI	: Tugas Pokok dan Fungsi
USRI	: <i>Urban Sanitation Rural Infrastructure</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Pemerintah Indonesia berusaha untuk mencapai akses sanitasi layak dengan meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Namun, dari data cakupan pelayanan akses sanitasi, tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015, dimana semula hanya 1.94% atau setara dengan 4.955.956 jiwa menjadi 1.93% atau setara dengan 4.920.875 jiwa (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017). Data pelayanan sanitasi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian akses sanitasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Kontribusi pihak lain baik itu pemerintah daerah, sektor swasta dan terutama masyarakat juga sangat berpengaruh. Dalam rangka menuju sanitasi yang lebih baik, maka diperlukan pengelolaan yang efektif, didukung dengan pengaturan yang jelas, pendanaan dan bentuk organisasi pelaksanaan di tingkat lokal.

Sistem berbasis masyarakat skala setempat diharapkan dapat berkontribusi dalam mencapai akses sanitasi yang lebih baik. Pembangunan pengolahan air limbah sistem setempat didanai dari berbagai sumber seperti APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau melalui program lain seperti SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat), USRI (*Urban Sanitation Rural Infrastructure*), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat). Pemerintah membuat berbagai program pembangunan sanitasi ini bertujuan agar masyarakat ikut berkontribusi dalam pencapaian sanitasi yang layak di Indonesia.

Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang pembangunan pengolahan air limbahnya masih terus berkembang. Dari hasil data yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, hingga tahun 2019 telah dibangun 130 IPAL Komunal yang tersebar di 14 kecamatan. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman ini dapat dilihat bahwa terdapat empat

jenis program pengadaan IPAL Komunal. Program yang dimaksud adalah SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat), USRI (*Urban Sanitation Rural Infrastructure*), SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk membangun IPAL Komunal di Kabupaten Sleman.

Keempat program pengadaan sanitasi tersebut sesungguhnya sama bila ditinjau dari konsep dan prinsipnya, yang membedakan adalah mekanisme dan sumber pendanaannya. Meskipun IPAL Komunal sudah terbangun, hal ini bukan jaminan bahwa sarana tersebut berjalan dengan baik tahap pasca konstruksi. Agar program berjalan dengan baik, maka didukung dengan sebuah organisasi pelaksana di tingkat lokal, pendanaan dan dukungan dari pemerintah. Karena itulah, pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak terkait lain untuk menjalankan pengelolaan IPAL Komunal dengan baik. Dengan adanya IPAL Komunal di Kabupaten Sleman dengan 4 program pengadaan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam mencapai sanitasi yang baik, khususnya di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan hasil evaluasi IPAL Komunal dengan program pengadaan yang berbeda di Kabupaten Sleman. Evaluasi dilakukan di tahap pasca konstruksi untuk mengetahui apakah IPAL Komunal berjalan dengan baik berdasarkan aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan.

1.2 Perumusan Masalah

Berawal dari empat program pengadaan IPAL Komunal yang berbeda di Kabupaten Sleman, maka rumusan masalahnya adalah apakah IPAL Komunal dengan program SANIMAS, USRI, DAK dan SLBM pada tahap pasca konstruksi memiliki hasil evaluasi yang sama dan berjalan dengan baik berdasarkan aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi IPAL Komunal berdasarkan program pengadaan dan pembangunan.
2. Mengevaluasi IPAL Komunal pada tahap pasca konstruksi berdasarkan aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah dan keuangan.
3. Membandingkan kinerja IPAL Komunal pada tahap pasca konstruksi berdasarkan program pembangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kondisi IPAL Komunal di Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui perbandingan program sanitasi yang berbeda pada tahap pasca konstruksi IPAL Komunal di Kabupaten Sleman berdasarkan aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan.
3. Mengetahui keberlangsungan IPAL Komunal tiap program pada tahap pasca konstruksi, berdasarkan aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan.
4. Mengetahui aspek yang dapat ditingkatkan pada IPAL Komunal tiap program pengadaan dilihat dari hasil evaluasi berdasarkan aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan.
5. Dapat memberikan informasi kepada pemerintah terkait, agar dalam pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sanitasi dapat berjalan secara maksimal dengan pendekatan yang lebih baik kepada masyarakat.

6. Dapat memberikan informasi kepada lembaga atau organisasi pengelola IPAL Komunal agar dapat mengetahui cara mengelola IPAL Komunal yang baik.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian dilakukan di IPAL Komunal Kabupaten Sleman yang dibangun dari Program SANIMAS, USRI, DAK dan SLMB.
2. Penelitian Program SANIMAS dilakukan di IPAL Sukunan, IPAL Agung Lestari dan IPAL Mendiro.
3. Penelitian Program USRI dilakukan di IPAL Dukuh Berbakti, IPAL Tirto Mili, IPAL Nologaten, IPAL Ganjuran, IPAL Condong Catur dan IPAL Ngaglik Sejahtera.
4. Penelitian Program DAK dilakukan di IPAL Mino Sehat dan IPAL Kaliwaru.
5. Penelitian Program SLBM dilakukan di IPAL Ambarketawang dan IPAL Blimbingsari.
6. Mengamati aspek kelembagaan pengelola, aspek kinerja pengelola, aspek peran pemerintah daerah dan aspek keuangan yang ada di setiap IPAL Komunal.
7. Penelitian dilakukan setelah proyek diselesaikan dan bangunan mulai beroperasi (pasca konstruksi).
8. Wawancara daring dengan pengelola IPAL Komunal, mengingat adanya pandemi COVID-19.
9. Wawancara daring kepada pengelola IPAL Komunal, mencakup masalah kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan IPAL Komunal.
10. Studi literatur yang akan didapatkan dari beberapa laporan akhir yang bertema Evaluasi IPAL Komunal di Kabupaten Sleman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sanitasi di Kabupaten Sleman

Jumlah penduduk di Kabupaten Sleman tahun 2017 adalah sebanyak 1,2 juta jiwa. Hal ini menjadikan Kabupaten Sleman menjadi kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar di D.I. Yogyakarta (Badan Pusat Statistik, 2019). Sebagian masyarakat yang tinggal di Kabupaten Sleman, telah memiliki fasilitas sanitasi yang memadai dibandingkan daerah pedesaan. Namun, tidak semua daerah di Kabupaten Sleman merasakan fasilitas sanitasi tersebut. Pemerintah daerah telah berupaya memperluas cakupan wilayah sanitasi. Pembangunan IPAL di Kabupaten Sleman diharapkan dapat mengatasi masalah sanitasi pada wilayah ini. Dari data yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup, sepanjang 2019 telah dibangun 130 IPAL komunal di Kabupaten Sleman. Pemerintah daerah di Kabupaten Sleman tiap tahunnya berupaya untuk meningkatkan kualitas sanitasi di Kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman memiliki IPAL Komunal dengan program pengadaan seperti SANIMAS, USRI, DAK dan SLBM. Pemerintah Kabupaten Sleman membuat suatu wadah bagi seluruh pengelola IPAL yang rutin diselenggarakan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang bekerjasama dengan AKSANSI. Dalam kegiatan ini, pengelola IPAL diberikan informasi tentang pengelolaan dan perawatan IPAL Komunal, pelatihan-pelatihan dan lomba sanitasi award yang diadakan setiap satu tahun (AKSANSI, 2016).

Dalam penelitian Al Rasyid (2020), rata-rata IPAL Komunal di Kabupaten Sleman sudah berfungsi dengan baik. Dan dari analisis data, ditemukan bahwa program SANIMAS adalah program yang terbaik dibandingkan program pengadaan lain yang ada di Kabupaten Sleman. IPAL Komunal dengan program SANIMAS rutin melakukan pemeliharaan sesuai SOP (*Standard Operating Procedure*) dan rutin melakukan uji kualitas air limbah. Selain itu, ditemukan salah satu IPAL Komunal dengan program SLBM yang dinilai kurang dalam hal keaktifan pengelolanya. Berdasarkan penelitian tersebut, IPAL Komunal tidak

menjalankan SOP pemeliharaan dengan baik, hal ini terjadi karena adanya konflik internal antara pengelola dengan masyarakat pengguna IPAL Komunal.

2.2 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal merupakan sistem pengolahan air limbah yang digunakan oleh sekelompok rumah tangga secara terpusat pada suatu bangunan yang berguna untuk mengolah limbah cair domestik agar lebih aman ketika dibuang ke lingkungan. IPAL Komunal juga didefinisikan sebagai rangkaian unit pengolahan pendahuluan, pengolahan utama dan pengolahan tersier, beserta bangunan pelengkap lain, yang tersambung dengan perpipaan yang dapat menyalurkan air limbah dari permukiman (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019).

IPAL Komunal merupakan pengolahan air limbah domestik yang dikembangkan pada daerah perkotaan dengan sistem terpusat dan menggunakan sistem perpipaan sebagai saluran air limbah yang akan di proses di IPAL Komunal yang bersumber dari rumah masyarakat. Jaringan perpipaan pada IPAL Komunal ini harus dibersihkan secara berkala, agar tidak terjadi penyumbatan (Bahar, et al., 2017).

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal dengan sistem perpipaan terdiri atas bangunan IPAL dan sistem perpipaannya. IPAL Komunal terdiri dari bak inlet, bak pengolahan dengan pilihan beberapa teknologi dan bak outlet. Pemilihan teknologi bak pengolahan air limbah tergantung pada kebutuhan dan kapasitas disesuaikan dengan kondisi kepadatan penduduk, lahan yang akan dibangun, muka air tanah, kemudahan pengoperasian, serta pemeliharaan IPAL (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016).

2.3 Peraturan Tentang Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik menjelaskan bahwa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang disingkat

SPALD diadakan sebagai pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. Untuk mencapai SPALD yang berkelanjutan serta meningkatkan pelayanan air limbah yang berkualitas, pelaksanaannya dilakukan dengan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sistem pengelolaan yang melakukan pengolahan air limbah domestik di lokasi sumber dan lumpur hasil olahan nantinya akan diangkut, dinamakan SPALD Setempat (SPALD-S). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 pasal 10 ayat 4 SPALD-S dengan kapasitas skala komunal diperuntukan untuk 2 hingga 10 unit rumah tinggal.

2.4 Program Pengadaan IPAL Komunal

2.4.1 SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat)

Berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017 SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat) adalah salah satu program penyelenggaraan prasarana dan sarana sanitasi air limbah berbasis masyarakat yang dalam pelaksanaannya menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut:

1. Tanggapan Kebutuhan
 - a) Pemerintah Kabupaten/Kota berkomitmen untuk memberikan dana, bantuan teknis dan bertanggungjawab pada pembinaan tahap persiapan, perencanaan dan pasca konstruksi;
 - b) Masyarakat memiliki komitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan Program SANIMAS.
2. Seleksi Mandiri Calon Lokasi
Pemilihan lokasi berada sepenuhnya di tangan masyarakat dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota hanya sebagai fasilitator.
3. Pilihan Teknologi
Masyarakat diberikan edukasi tentang bentuk bangunan dan teknologi pengolahan air limbah domestik agar masyarakat dapat memilih teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat
4. Partisipasi masyarakat

Masyarakat berperan aktif dalam setiap tahapan dengan didampingi oleh Fasilitator Provinsi dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

5. Kesetaraan Gender

Keterlibatan baik laki-laki maupun perempuan dapat berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan Program SANIMAS, yaitu pada tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pasca konstruksi sesuai dengan kapasitasnya.

6. Berkelanjutan

Pengoperasian dan pemeliharaan sarana sanitasi terbangun dilaksanakan secara berkelanjutan oleh masyarakat dengan dibantu oleh pemerintah daerah.

7. Multi Pendanaan

Selain dana dari Pemerintah, Program SANIMAS membuka peluang bagi pihak lain diantaranya swasta, dunia usaha, koperasi, individu dan kelompok.

8. Akuntabel

Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan Program SANIMAS dapat berasal dari berbagai sumber, selama tidak mengurangi makna dari pemberdayaan sebagai model pendekatan yang dijalankan Program SANIMAS. Sumber pendanaan bisa berasal dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD) dan swadaya masyarakat.

2.4.2 USRI (*Urban Sanitation and Rural Infrastructure*)

Tujuan dari Program USRI (*Urban Sanitation and Rural Infrastructure*) yang dijelaskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi menyelesaikan berbagai permasalahan dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Pelaksanaan program ini didanai oleh *Asian Development Bank (ADB)* Loan No. 2768-INO. Beberapa prinsip dalam penyelenggaraan program ini yaitu:

1. Dapat diterima, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan dan diterima masyarakat.

2. Transparan, kegiatan pengelolaan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
3. Dapat dipertanggungjawabkan, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4. Berkelanjutan, kegiatan pengelolaan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

2.4.3 DAK (Dana Alokasi Khusus)

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Ditjen Cipta Karya, 2016 adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses sanitasi, yang pendanaannya bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program DAK ini diperuntukkan untuk prasarana dan sarana masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan DAK 2016 agar pengadaan barang atau jasa pada Program DAK hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan, maka diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Efisien, artinya pengadaan barang/jasa diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang telah ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat.
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga didapatkan barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2.4.4 SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat)

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (2014) SLBM adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan dan keandalan pelayanan sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah secara komunal untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimum penyediaan sanitasi di kawasan rawan sanitasi. Sumber pendanaan program berasal dari APBN dan APBD serta masyarakat. Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut:

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa diusahakan dengan menggunakan dana serta daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang sudah ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat.
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi *keuntungan* kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip yang dijadikan acuan pada masing-masing program berdasarkan aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah dan keuangan ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Prinsip Program Pengadaan IPAL Komunal

Aspek	SANIMAS ^[1]	USRI ^[2]	DAK ^[2]	SLBM ^[3]
Kelembagaan pengelola	Kegiatan pengelolaan harus dapat dipertanggung-jawabkan	Pengelolaan dilakukan berdasarkan SOP serta bersifat terbuka dan diketahui oleh seluruh masyarakat	Setiap kegiatan bersifat transparan dan terbuka yang berarti semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan mengetahui semua informasi pengelolaan	Setiap kegiatan bersifat transparan dan terbuka yang berarti semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan mengetahui semua informasi pengelolaan

Kinerja pengelola berdasarkan tugas pokok dan fungsinya	Pengelola mengoperasikan -kan dan memelihara sarana sanitasi secara berkelanjutan	Kegiatan pengelolaan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat	Kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat	Kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat
Peran pemerintah daerah	Pemerintah menyediakan bantuan biaya dan teknis serta bertanggung jawab pada pembinaan masyarakat hingga tahap pasca konstruksi	Pemerintah menyediakan bantuan teknis dan biaya operasional TFL mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi	Pemerintah menyediakan bantuan teknis dan biaya untuk kegiatan khusus untuk sarana yang belum mencapai standar tertentu	Pemerintah menyediakan biaya dan bantuan teknis yang dibutuhkan selama pengelolaan
Keuangan	Selain dari pemerintah, dapat berasal dari pihak swasta, usaha, individu atau kelompok serta koperasi	Bisa berasal dari APBN, APBD serta swadaya masyarakat. Dana ADB merupakan pinjaman pusat yang digunakan sebagai biaya konsultan manajemen	Bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah	Berasal dari APBD dan APBN serta masyarakat

Sumber: [1] (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2017), [2] (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016), [3] (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2014)

2.5 Tahap Pasca Konstruksi

2.5.1 Kelembagaan Pengelola

Pada tingkat masyarakat dibutuhkan pelaksana untuk mengelola jalannya sarana dan prasarana yang ada. Pelaksana di tingkat masyarakat terdiri dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pemanfaatan dan

Pemeliharaan (KPP). KSM dan KPP merupakan wakil masyarakat pengguna dan pemanfaat, sehingga keberhasilan program tergantung pada peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. Berdasarkan peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Petunjuk Pelaksanaan DAK (2016) jumlah personil pengelola minimal 5 orang. Dalam menjalankan tugasnya, pengelola memiliki struktur organisasi dan memiliki tugas serta tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang. Sebagai perwakilan masyarakat, pengelola wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan pembangunan sarana sanitasi kepada masyarakat. Setiap laporan maupun dokumen pelaksanaan sarana sanitasi, disimpan dan dipertanggungjawabkan oleh pengelola.

2.5.2 Kinerja Pengelola Berdasarkan Pengetahuan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi)

Sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan pengelolaan, secara umum tugas pokok pengelola sebagai pengurus IPAL Komunal menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Petunjuk Pelaksanaan DAK (2016) adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mengelola dana untuk biaya operasional dan pemeliharaan yang diperoleh dari iuran anggota dan pihak-pihak lain.
2. Mengoperasikan dan memelihara IPAL Komunal.
3. Meningkatkan mutu pelayanan dan jumlah pemanfaatan.
4. Bertanggung jawab terhadap hal-hal teknis.
5. Melakukan kampanye kesehatan.

2.5.3 Peran Pemerintah Daerah

Pada tahap pasca konstruksi pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan bantuan berupa bantuan teknis dan/atau bantuan pendanaan terkait kegiatan yang cukup besar seperti rehab sarana. Berdasarkan tugas dan tanggung jawab Pemda antara lain seperti:

1. Penguatan kelembagaan pengelola;

2. Memonitoring keberlangsungan serta keberlanjutan pemeliharaan sarana prasarana Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya terbangun serta pembinaan kepada pengelola dalam pengelolaan sarana;
3. Memberikan masukan atas kendala yang terjadi di tingkat masyarakat; dan
4. Memberikan bantuan teknis yang memungkinkan kepada masyarakat/KPP terkait hal teknis seperti, penyedotan lumpur dari tangki septik dan analisis teknis lainnya terkait pengelolaan sarana.

2.6 AKSANSI

AKSANSI adalah singkatan dari Asosiasi KSM/KPP Sanitasi Seluruh Indonesia, sebuah wadah atau forum komunikasi bagi para pengelola atau pengurus sanitasi yang ada di Indonesia. AKSANSI berdiri pada tanggal 23 November 2006 di Yogyakarta. AKSANSI membantu pemerintah untuk bekerjasama dengan pihak terkait dalam mengembangkan sarana sanitasi. Bagi pemerintah, AKSANSI bermanfaat untuk membantu berbagai hal seperti, melakukan monitoring sarana sanitasi, membantu permasalahan sosial pada KSM/KPP serta pemerintah mendapatkan bantuan keahlian teknis pada sarana yang mengalami masalah.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang IPAL Komunal dan program pengadaanya:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

Judul	Nama Peneliti	Hasil
Evaluasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di Kota Kediri	Marsono dan Trisnawati, 2012	Dari kelima lokasi penelitian yang ada di Kota Kediri dengan program SANIMAS dihasilkan bahwa dari aspek keuangan, terdapat satu lokasi yang melakukan penarikan iuran. Dan dari aspek pengelolaan hanya 2 KSM yang berfungsi semestinya.

		Sehingga disimpulkan Program SANIMAS yang ada di Kota Kediri termasuk dalam kategori baik.
Evaluasi Pengelolaan IPAL Komunal di Kabupaten Gresik	T.M. dan Soedjono, 2015	Dari aspek kelembagaan pengelola masih kurang paham tentang tugas dan fungsi sebagai pengurus IPAL. Penyebabnya terjadinya hal ini karena, kurangnya sosialisasi secara rutin antar sesama pengelola sehingga pelaksanaan kurang optimal.
Evaluasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Ciparigi Kota Bogor	Kurniasih, 2019	Dari hasil penelitian dari data yang dikumpulkan dengan wawancara dan pembagian kuesioner kepada masyarakat, semua indikator evaluasi telah terlaksana dengan baik. Namun, masyarakat belum seluruhnya dapat diberdayakan karena pembinaan dari pemerintah daerah masih kurang.
Evaluasi Kondisi IPAL Komunal di Kabupaten Sleman	Al Rasyid, 2020	Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa rata-rata IPAL Komunal di Kabupaten Sleman sudah berfungsi dengan baik. Dari analisis data program SANIMAS adalah program yang terbaik dibandingkan program pengadaan lain yang ada di Kabupaten Sleman. IPAL Komunal dengan program SANIMAS rutin melakukan pemeliharaan sesuai SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan rutin melakukan uji kualitas air limbah. Selain itu, ditemukan salah satu IPAL Komunal dengan program SLBM yang dinilai kurang dalam hal keaktifan pengelolanya.

Terdapat banyak penelitian yang membahas tentang kinerja IPAL Komunal berdasarkan aspek teknis. Analisis yang banyak dilakukan pada aspek teknis yaitu, terkait kondisi IPAL ataupun efisiensi IPAL. Selain itu, pembahasan tentang perbandingan program pengadaan IPAL Komunal berdasarkan aspek non teknis seperti kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah atau keuangan masih jarang ditemukan, khususnya di Kabupaten Sleman. Adapun penelitian yang telah melakukan evaluasi IPAL Komunal di Kabupaten Sleman

berdasarkan program pengadaannya membahas tentang kondisi IPAL Komunal secara umum dan sedikit membahas tentang masalah non teknis pada IPAL Komunal.

Sama halnya dengan penelitian terdahulu, penelitian ini juga membahas program pengadaan IPAL Komunal, khususnya yang ada di Kabupaten Sleman. Namun, pada penelitian ini program pengadaan IPAL Komunal akan di evaluasi dan difokuskan pada aspek kelembagaan, kinerja pengelola, peran pemerintah dan keuangan pada tahap pasca konstruksi dengan metode *scoring* dan pembobotan.

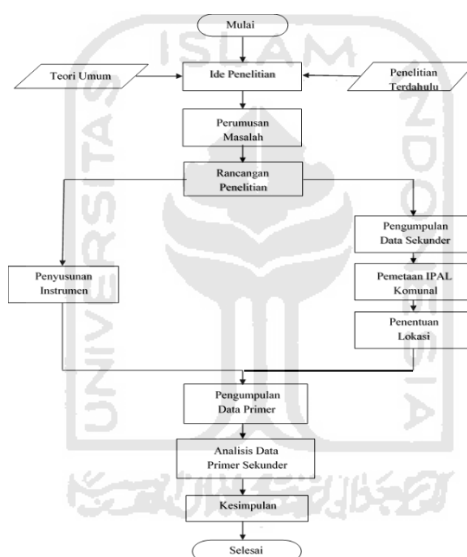


BAB III

METODE PENELITIAN

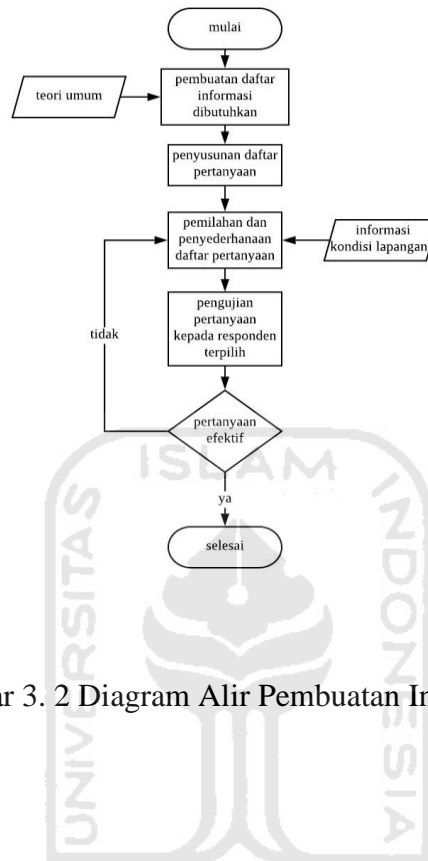
3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum akan ditunjukkan melalui diagram alir penelitian. Diagram alir pada Gambar 3.1 dibawah ini menggambarkan tahapan atau alur dalam penelitian.



Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian

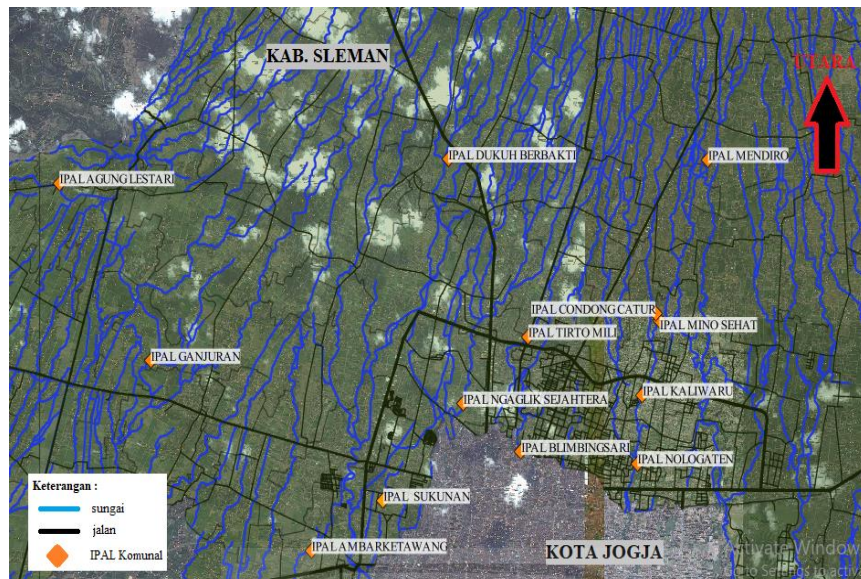
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Sebelum memulai penelitian, dilakukan studi literatur dengan cara mencari dari berbagai sumber tertulis berupa buku, artikel, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Setelah, itu dilakukan persiapan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Tahapan dalam pembuatan instrumen dapat dilihat pada Gambar 3.2 yang ada dibawah ini:



Gambar 3. 2 Diagram Alir Pembuatan Instrumen

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Januari hingga bulan Juli. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Data penelitian berasal dari IPAL Komunal yang tersebar ada di Kabupaten Sleman. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan program pengadaan IPAL Komunal, yang terdiri dari SANIMAS, USRI, DAK dan SLBM. Data IPAL Komunal didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.



Gambar 3. 3 Gambar Titik Lokasi Penelitian

Dari data yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan ditemukan informan yang dapat dihubungi serta dijadikan sebagai sumber untuk wawancara daring. Berdasarkan hal ini, terdapat tiga belas IPAL komunal yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, profil IPAL Komunal dapat dilihat pada Lampiran 4. Tiga belas IPAL Komunal dalam Tabel 3.1 diharapkan dapat mewakili IPAL Komunal yang ada di Kabupaten Sleman.

Tabel 3. 1 Daftar Lokasi Penelitian

Program	Nama IPAL	Alamat
SANIMAS	IPAL Sukunan	Sukunan, RW 19, Banyuraden, Gamping
	IPAL Agung Lestari	Bontitan, Sendangagung, Minggir
	IPAL Mendiro	Mendiro Sukoharjo Ngaglik Sleman

Tabel 3. 2 Daftar Lokasi Penelitian (lanjutan)

Program	Nama IPAL	Alamat
USRI	IPAL Dukuh Berbakti	Dukuh, Tridadi, Sleman
	IPAL Tirto Mili	Jongkang, Sariharjo, Ngaglik
	IPAL Nologaten	Nologaten, Caturtunggal, Depok
	IPAL Ganjuran	Bletuk, Ganjuran, Sidorejo, Godean
	IPAL Condong Catur	Condongcatur, Depok
	IPAL Ngaglik Sejahtera	Ngaglik, RT 02/RW 06, Sinduadi, Mlati
DAK	IPAL Mino Sehat	Plosokuning V, Minomartani, Ngaglik
	IPAL Kaliwaru	Kaliwaru, Condongcatur
SLBM	IPAL Ambarketawang	Bodeh, Ambarketawang, Gamping
	IPAL Blimbingsari	Blimbingsari, RT 04/RW 16, Caturtunggal, Depok

3.3 Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara kepada pengelola IPAL Komunal. Pertanyaan yang diberikan mencakup aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan. Instrumen penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.

2. Data Sekunder

Data sekunder didapat dari dokumen-dokumen, buku atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Data mengenai lokasi IPAL, program pengadaan, tahun pembuatan, tahun beroperasi, jumlah KK serta kontak pengelola IPAL, didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Selain itu, penggunaan data dari jurnal, buku petunjuk teknis sanitasi dan penelitian terdahulu dapat mendukung penelitian ini.

3.4 Prosedur Analisis Data

Setelah selesai wawancara daring, peneliti mencatat kembali detail-detail selama wawancara berlangsung, hal ini dapat membantu peneliti dalam menganalisis. Peneliti membuat *database* baru berupa nama penelitian, nama informan, tanggal dan pertanyaan. Selanjutnya, data wawancara yang didapatkan

dimasukkan ke dalam *database* yang telah dibuat, serta dicocokkan jawaban informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

Peneliti membagi data berdasarkan beberapa aspek yaitu aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan IPAL Komunal, hal ini dilakukan peneliti untuk mempermudah analisis data. Setelah itu, dilakukan *scoring* dan pembobotan untuk indikator masing-masing aspek lalu dianalisis dan dikaji dengan membandingkan, merangkum dan menyimpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi penelitian sehingga didapatkan kesimpulan sesuai tujuan yang diinginkan.

3.4.1 Scoring

Scoring adalah teknik pengambilan keputusan dalam proses yang terdapat faktor-faktor yang memiliki nilai masing-masing. Penentuan penilaian dilakukan secara subjektif yaitu dengan menetapkan nilai berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu data dari informan. Proses *scoring* berguna untuk memberi nilai setiap indikator yang mempengaruhi suatu aspek. Semakin tinggi nilainya, semakin besar pengaruhnya. Diberikan nilai 1 pada indikator yang berpengaruh kecil dan nilai 3 untuk indikator yang berpengaruh besar terhadap aspek. Setiap indikator memiliki parameter masing-masing yang disesuaikan berdasarkan hasil wawancara daring bersama informan. Aspek dan indikator beserta parameter yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3. 3 Aspek, Indikator dan Parameter

No.	Aspek/Kriteria	Indikator	Parameter		
1	Kelembagaan pengelola	a	Struktur Pengelola	Jumlah pengelola cukup dan berfungsi aktif	3
				Jumlah pengelola cukup tetapi pengelola kurang aktif	2
				Jumlah pengelola kurang dan pengelola tidak aktif	1
		b	Pelaporan tentang IPAL Komunal kepada masyarakat	Ada pelaporan dan pertemuan rutin	3
				Ada pelaporan tetapi tidak ada pertemuan rutin	2
				Tidak ada pelaporan dan pertemuan	1
		c	Dokumentasi pengelolaan	Dokumentasi disimpan ditempat yang baik dan disimpan oleh pengelola	3
				Dokumentasi disimpan ditempat yang baik, tetapi tidak disimpan oleh pengelola	2
				Dokumentasi tidak disimpan	1
		d	Adanya SOP pemeliharaan	Ada SOP	3
				Tidak ada SOP tertulis, tetapi hanya pelatihan	2
				Tidak ada SOP	1
2	Kinerja Pengelola berdasarkan Pengetahuan TUPOKSI	a	Yang Mengumpulkan Dan Mengelola Biaya Operasional Dan Pemeliharaan	Menjawab dan paham tupoksinya	3
				Menjawab tetapi tidak paham tupoksinya	2
				Tidak menjawab dan tidak paham tupoksinya	1
		b	Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan	Menjawab dan paham tupoksinya	3
				Menjawab tetapi tidak paham tupoksinya	2
				Tidak menjawab dan tidak paham tupoksinya	1
		c	Pengurus paham mengoperasikan IPAL Komunal	Menjawab dan paham tupoksinya	3
				Menjawab tetapi tidak paham tupoksinya	2
				Tidak menjawab dan tidak paham tupoksinya	1
		d	Yang Bertanggung Jawab Pada Kerusakan	Menjawab dan paham tupoksinya	3
				Menjawab tetapi tidak paham tupoksinya	2
				Tidak menjawab dan tidak paham tupoksinya	1
		e	Penyuluhan Kesehatan	Menjawab dan paham tupoksinya	3
				Menjawab tetapi tidak paham tupoksinya	2
				Tidak menjawab dan tidak paham tupoksinya	1

Tabel 3. 4 Aspek, Indikator dan Parameter (lanjutan)

3	Peran Pemerintah Daerah	a	Fasilitas kelembagaan oleh Pemda	Ada pembinaan/penyuluhan secara rutin dari Pemda dalam waktu tertentu	3
				Ada pembinaan/penyuluhan tetapi hanya sekali diawal dari Pemda	2
				Tidak pernah ada pembinaan/penyuluhan dari Pemda	1
		b	Memonitoring keberlangsungan pengelolaan	Pernah dilakukan beberapa kali	3
				Pernah dilakukan sekali	2
				Tidak pernah dilakukan	1
		c	Bantuan teknis (penyedotan lumpur)	Pemda rutin mengirimkan bantuan	3
				Pemda mengirimkan bantuan sesuai permohonan IPAL	2
				Tidak ada bantuan	1
4	Keuangan	a	Pemasukan IPAL Komunal	≥ 3 sumber pemasukan	3
				2 sumber pemasukan	2
				Hanya iuran pelanggan	1
		b	Iuran dari masyarakat	Masyarakat membayar iuran sesuai hasil kesepakatan dan tepat waktu	3
				Masyarakat membayar iuran sesuai hasil kesepakatan tetapi tidak tepat waktu	2
				Tidak membayar iuran	1
		c	Pengelolaan Keuangan	Ada pencatatan lengkap dan dana disimpan di bank	3
				Ada pencatatan lengkap dan dana tidak disimpan di Bank	2
				Tidak ada pencatatan	1

3.4.2 Pembobotan

Pembobotan adalah teknik pengambilan keputusan dalam suatu proses yang memiliki faktor-faktor yang diberi bobot masing-masing. Analisis yang dilakukan berdasarkan empat aspek, yaitu aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan IPAL Komunal. Besar bobot aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola dan peran pemerintah daerah adalah 67% dan aspek keuangan adalah 33%. Penilaian ditentukan oleh peneliti berdasarkan dari pembobotan yang digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian Pekerjaan Umum , 2018). Besaran pembobotan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Pembobotan Evaluasi

Aspek/Kriteria	Indikator	Bobot
Kelembagaan pengelola	Lembaga pengelola	30%
	Struktur organisasi	
	Sumber daya manusia (pengelola)	
Keuangan	Fasilitas dari pemerintah daerah	15%
	Kondisi keuangan	
	Pengelolaan keuangan	
	Iuran masyarakat	

Sumber : (Kementrian Pekerjaan Umum , 2018)

Karena pada penelitian ini difokuskan hanya berdasarkan pada aspek kelembagaan dan keuangan, maka setelah mencari dari berbagai referensi penelitian terdahulu, peraturan dan mendapatkan data wawancara, pembobotan dan indikator yang digunakan oleh peneliti adalah seperti pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Pembobotan Aspek dalam Penelitian

Aspek/Kriteria	Indikator	Bobot
Kelembagaan pengelola	Struktur pengelola	67%
	Pelaporan kepada masyarakat	
	Dokumentasi pengelolaan	
	Adanya SOP pemeliharaan	
Kinerja pengelola	Pengelola keuangan	
	Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan	
	Paham pengoperasian	
	Yang Bertanggung Jawab Pada Kerusakan	
Peran Pemerintah Daerah	Penyuluhan Kesehatan	
	Fasilitas kelembagaan oleh Pemda	
	Memonitoring keberlangsungan pengelolaan	
Keuangan	Bantuan teknis (penyedotan lumpur)	33%
	Pemasukan IPAL Komunal	
	Iuran dari masyarakat	
	Pengelolaan Keuangan	
Total		100%

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data-data wawancara daring dan dokumentasi yang sebelumnya telah diolah melalui sebuah *database* mengenai aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola berdasarkan pengetahuan TUPOKSI (Tujuan Pokok dan Fungsi), peran pemerintah daerah dan keuangan di IPAL Komunal yang ada di Kabupaten Sleman, baik yang program pengadaannya SANIMAS, USRI, DAK maupun SLBM.

4.1 Permasalahan IPAL Komunal di Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil wawancara daring pengelola ketiga belas IPAL Komunal yang ada di Kabupaten Sleman. Diketahui bahwa ketiga belas IPAL Komunal masih beroperasi, hal ini dapat dilihat pada profil IPAL Komunal pada Lampiran 4. Permasalahan yang paling sering terjadi pada IPAL Komunal adalah tersumbatnya jaringan dan bau. Berikut ini adalah data permasalahan IPAL Komunal yang didapatkan:

Tabel 4. 1 Permasalahan IPAL Komunal

Nama IPAL	Permasalahan				
	Tersumbat	Bau	Kebocoran	Lainnya	Tidak Ada
IPAL Sukunan	✓			✓	
IPAL Agung Lestari	✓		✓		
IPAL Mendiro	✓	✓			
IPAL Dukuh Berbakti		✓			
IPAL Tirto Mili	✓				
IPAL Nologaten	✓				
IPAL Ganjuran	✓				
IPAL Condong Catur	✓	✓			
IPAL Ngaglik Sejahtera		✓		✓	
IPAL Mino Sehat					✓

Tabel 4. 2 Permasalahan IPAL Komunal (lanjutan)

Nama IPAL	Tersumbat	Bau	Kebocoran	Lainnya	Tidak Ada
IPAL Kaliwaru	✓	✓			
IPAL Ambarketawang					✓
IPAL Blimbingsari		✓			

Berdasarkan data dalam Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa masalah yang paling banyak dialami oleh IPAL Komunal adalah tersumbat atau mampet pada jaringan. Tersumbatnya jaringan perpipaan dapat disebabkan oleh lemak yang menumpuk. Lemak ini berasal dari limbah dapur yang dibuang oleh masyarakat. Selain mengandung minyak dan lemak, limbah dari dapur terkadang bercampur dengan sisa makanan. Walaupun pengelola IPAL Komunal telah memberikan himbauan untuk menyaring limbah dapur sebelum dibuang ke saluran IPAL Komunal, namun masih saja ada sebagian masyarakat yang belum melakukan hal tersebut. Minyak dan lemak dapat menurunkan kualitas air. Kandungan minyak dan lemak yang berlebihan pada badan air dapat mengurangi penetrasi cahaya dan oksigen ke dalam air sehingga menghambat jalannya pemurnian alami (Hendrawan, 2008). Selain itu, pembuangan kotoran padat ke saluran IPAL tidak disertai dengan gelontoran air yang cukup dapat menjadi salah satu penyebab mampetnya jaringan. Jadi, untuk mencegah terjadinya penyumbatan pada jaringan, pengelola IPAL Komunal rutin melakukan pengecekan dan pembersihan jaringan seminggu sekali agar lemak yang terbawa ke IPAL Komunal tidak menumpuk.

Selain tersumbat, timbulnya bau pada IPAL Komunal merupakan masalah yang tidak jarang dialami. Biasanya bau pada IPAL Komunal muncul saat awal pengoperasian IPAL Komunal, hal ini terjadi karena mikroba dalam IPAL Komunal belum tumbuh (Said, 2006). Permasalahan bau pada IPAL Komunal biasanya akan meningkat saat musim hujan karena debit air limbah yang masuk dapat melebihi kapasitas IPAL Komunal. IPAL Mendiro pernah mengalami luapan air di musim penghujan. Masyarakat yang tinggal disekitar IPAL Komunal mengeluh karena merasa terganggu dengan bau yang disebabkan oleh IPAL Komunal yang meluap.

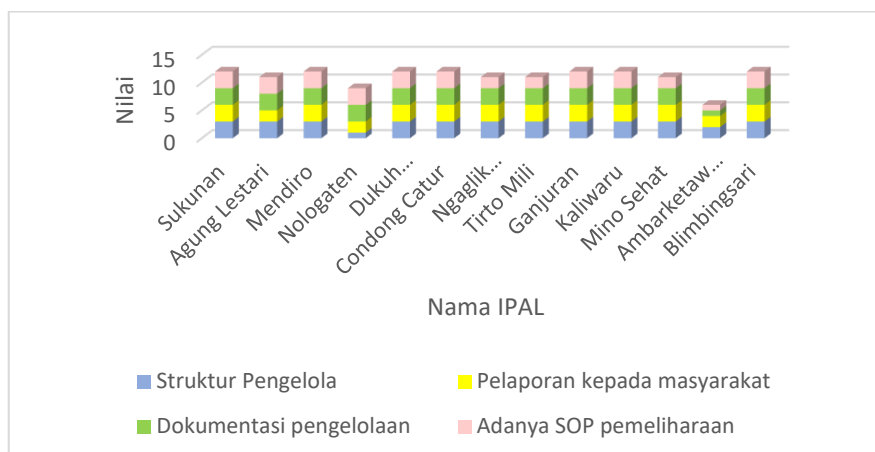
Masalah lain yang dialami oleh IPAL Komunal adalah kebocoran bak kontrol yang di IPAL Agung Lestari dan bergesernya pipa outlet pada IPAL Ngaglik Sejahtera apabila aliran sungai sedang deras. Kedua masalah ini paling sering terjadi disaat musim penghujan, bak kontrol yang bocor karena terkena air hujan terus menerus dan meningkatnya debit serta aliran air sungai yang dapat menggeser pipa outlet. Pengelola IPAL Agung Lestari dan IPAL Ngaglik Sejahtera selalu melakukan pengecekan dan perbaikan apabila ada kerusakan, pada bagian-bagian IPAL Komunal yang sering mengalami masalah.

4.2 Perbandingan Evaluasi Aspek Kelembagaan Pengelola, Kinerja Pengelola Berdasarkan Pengetahuan TUPOKSI, Peran Pemerintah Daerah dan Keuangan

Sub bab ini menjelaskan tentang temuan peneliti. Data hasil wawancara daring yang didapatkan diolah dengan cara *scoring*. Pada sub bab ini setiap IPAL Komunal akan dinilai berdasarkan empat aspek yaitu, kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan. Penilaian IPAL Komunal tiap indikator berdasarkan data hasil wawancara daring dapat dilihat pada Lampiran 3.

4.2.1 Aspek Kelembagaan Pengelola

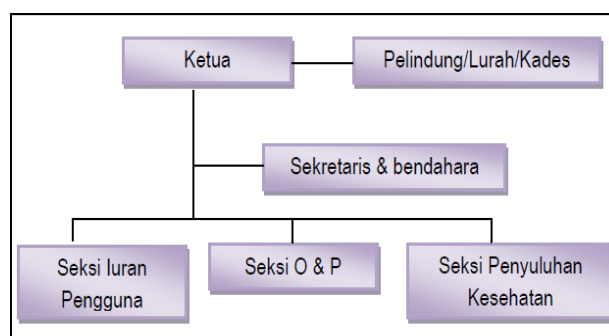
Gambar di bawah ini merupakan grafik perbandingan aspek kelembagaan pengelola di IPAL Komunal yang ada di Kabupaten Sleman. Aspek ini terdiri dari empat indikator antara lain adalah struktur pengelola, pelaporan IPAL Komunal kepada masyarakat, dokumentasi pengelolaan dan tersedianya SOP pemeliharaan pada IPAL Komunal.



Gambar 4. 1 Perbandingan Aspek Kelembagaan Pengelola

❖ Struktur Pengelola

Pengelola IPAL Komunal merupakan wakil masyarakat penerima manfaat kegiatan sanitasi. Penentuan pengelola dilakukan melalui musyawarah masyarakat dengan susunan yang ditetapkan dalam surat keputusan (SK) Kelurahan. Jumlah personil yang diisyaratkan oleh Kementerian PU yaitu paling sedikit 5 orang. Pembagian tugas untuk setiap personil sesuai struktur dibutuhkan agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak terjadi tumpang tindih satu sama lain. Hal itu penting untuk optimalnya pelaksanaan tugas yang dimiliki oleh masing-masing personil hingga mampu bekerjasama. Struktur organisasi pengelola dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut:



Gambar 4. 2 Contoh Bagan Struktur Pengelola

Dilihat dari grafik pada Gambar 4.1 diketahui bahwa sebelas dari tiga belas IPAL Komunal yaitu Sukunan, Agung Lestari, Mendiro, Dukuh Berbakti, Condong Catur, Ngaglik Sejahtera, Tirto Mili, Ganjuran, Kaliwaru, Mino Sehat dan Blimbingsari memperoleh nilai tertinggi yang sama. Nilai yang diperoleh sama karena kesebelas IPAL Komunal memiliki jumlah personil pengelola berada diatas ketentuan jumlah personil yang disyaratkan oleh Kementerian PU. Jumlah personil yang diisyaratkan oleh Kementerian PU yaitu paling sedikit 5 orang. Selain itu, pengelola disebelass IPAL Komunal ini memiliki agenda untuk berkumpul bersama dan membahas jalannya kegiatan sanitasi. Pengelola aktif dalam pengelolaan IPAL Komunal. Selain itu, setiap IPAL Komunal memiliki *grup* pada *handphone* pengelola masing-masing untuk saling berkoordinasi.

Sedangkan, Ambarketawang dan Nologaten mendapatkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan sebelas IPAL Komunal. Jumlah personil pengelola di kedua IPAL Komunal juga sudah berada diatas ketentuan. Yang membedakan yaitu, pengelola di kedua IPAL Komunal tidak memiliki agenda untuk berkumpul sesama pengelola sehingga dapat terjadi kurangnya koordinasi antar personil. Kurangnya komunikasi antar pengelola dapat mempengaruhi jalannya kegiatan pengelolaan di IPAL Komunal. Contohnya seperti saat pembersihan jaringan yang tersumbat karena sampah yang menumpuk. Hal ini, tidak dibicarakan sesama pengelola, maka kejadian ini bisa saja akan terus berlangsung. Apabila dibicarakan sesama pengelola, maka akan dicari jalan keluarnya bersama seperti, memberikan pemberitahuan atau himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah kedalam jaringan IPAL Komunal agar tidak terjadi penyumbatan.

❖ Pelaporan tentang IPAL Komunal kepada Masyarakat

Salah satu prinsip dalam program pengadaan IPAL Komunal adalah transparan, yang berarti kegiatan IPAL Komunal dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh masyarakat. Ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2014).

Pengelola membuat laporan kegiatan mingguan untuk masyarakat berisi kemajuan pelaksanaan pembangunan fisik dan keuangan IPAL Komunal (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016). Dilihat dari grafik pada Gambar 4.1 diketahui bahwa dari tiga belas IPAL Komunal, yang mendapatkan nilai tinggi ada sepuluh IPAL Komunal. Kesepuluh IPAL Komunal ini adalah Sukunan, Mendiro, Dukuh Berbakti, Condong Catur, Ngaglik Sejahtera, Tirto Mili, Ganjuran, Kaliwaru, Mino Sehat dan Blimbingsari, melakukan pelaporan rutin kepada masyarakat. Jadwal rutin yang dilakukan setiap IPAL Komunal juga berbeda, ada yang sebulan sekali dan tiga bulan sekali. Pelaporan pengelola kepada masyarakat berisi kegiatan IPAL Komunal seperti, kemajuan pelaksanaan pembangunan fisik dan keuangan. Pengelola mengadakan pelaporan saat pertemuan RT atau pertemuan rutin ibu-ibu.

Sedangkan, Agung Lestari, Nologaten dan Ambarketawang sama-sama mendapatkan nilai lebih rendah. Ketiga IPAL Komunal ini sama-sama melakukan pelaporan kepada masyarakat perihal pengelolaan IPAL Komunal akan tetapi, yang mempengaruhi perolehan nilai ketiga IPAL Komunal menjadi sedikit lebih rendah adalah ketiganya melakukan pelaporan kepada masyarakat sekitar setahun sekali apabila ada kunjungan dari pemerintah daerah, yang mungkin saja bisa terjadi hanya setahun sekali.

❖ Dokumentasi Pengelolaan

Dokumen IPAL Komunal yang disimpan oleh pengelola dapat digunakan sebagai laporan ke pemerintah dan evaluasi. Dokumen IPAL Komunal salah satunya yaitu RKM (Rencana Kerja Masyarakat) yang berisi tentang:

1. Profil lokasi
2. Organisasi dan struktur pengelola
3. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART)
4. Surat ketersediaan lahan
5. Dokumen dan berita acara seleksi kampung
6. Surat penetapan penerima manfaat dari Kabupaten/Kota
7. Penentuan calon pengguna

8. Pemilihan teknologi sanitasi
9. DED dan RAB
10. Rekening Bank
11. Pengelolaan keuangan
12. Rencana kerja
13. Jaminan dari masyarakat pengguna

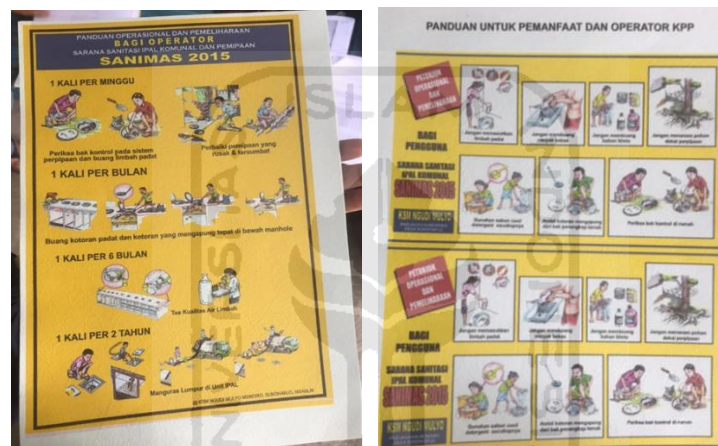
(Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016)

Dilihat dari grafik pada Gambar 4.1 diketahui bahwa IPAL Komunal yang memperoleh nilai terendah pada indikator dokumentasi adalah Ambarketawang. Hanya dokumentasi di Ambarketawang yang tidak diketahui keberadaannya oleh pengelola. Dokumentasi IPAL Ambarketawang kemungkinan telah hilang. Hal ini terjadi karena pengelola tidak menyimpan dokumentasi IPAL Komunal. Menurut pengelola, dokumen IPAL Komunal terakhir kali diketahui berada pada penanggung jawab konstruksi yang bukan merupakan pengelola Ambarketawang. Ini mengapa Ambarketawang memperoleh nilai terendah pada indikator dokumentasi dibandingkan dengan IPAL Komunal lain yang menyimpan dokumentasinya dengan baik.

❖ Adanya SOP Pemeliharaan

SOP adalah pedoman yang dibuat oleh pengelola dan dimusyawarahkan serta disahkan oleh kepala desa/lurah setelah mencapai mufakat. Dilihat dari grafik pada Gambar 4.1 diketahui bahwa dari tiga belas IPAL Komunal, yang mendapatkan nilai tinggi ada sembilan IPAL Komunal. IPAL Komunal yang memperoleh nilai tertinggi adalah Sukunan, Agung Lestari, Mendiro, Nologaten, Dukuh Berbakti, Condong Catur, Ganjuran, Kaliwaru, dan Blimbingsari. Kesembilan IPAL Komunal memiliki SOP tertulis pada IPAL Komunal bertujuan agar pengelola dapat melihat SOP pemeliharaan dan melakukan pemeliharaan dengan baik sesuai dengan standar yang ada. Salah satu contoh gambar yang menunjukkan SOP pemeliharaan dapat dilihat pada Gambar 4.3 yang digunakan pada IPAL Mendiro.

Ngaglik Sejahtera, Tirto Mili dan Mino Sehat memperoleh nilai lebih rendah dikarenakan ketiga IPAL Komunal sama-sama memiliki SOP pemeliharaan, namun SOP pemeliharaannya tidak tertulis. Sedangkan yang memperoleh nilai terendah yaitu Ambarketawang. Pengelola di Ambarketawang tidak memiliki SOP pemeliharaan. Pengelola melakukan pemeliharaan tidak berdasarkan standar. Pemeliharaan hanya akan dilakukan ketika terdapat keluhan atau masalah pada IPAL Komunal.



Gambar 4. 3 SOP Pemeliharaan IPAL Mendiro

4.2.2 Aspek Kinerja Pengelola Berdasarkan Pengetahuan TUPOKSI

Gambar di bawah ini merupakan grafik perbandingan aspek kinerja pengelola berdasarkan pengetahuan TUPOKSI pengelola IPAL Komunal yang ada di Kabupaten Sleman. Aspek ini terdiri dari lima indikator antara lain yaitu mengumpulkan dan mengelola biaya operasional dan pemeliharaan, upaya peningkatan mutu pelayanan, mengoperasikan IPAL Komunal dan penyuluhan kesehatan.



Gambar 4. 4 Perbandingan Aspek Kinerja Pengelola

❖ Mengumpulkan dan Mengelola Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Dilihat dari grafik pada Gambar 4.4 diketahui bahwa ketiga belas IPAL Komunal hampir memperoleh nilai tertinggi yang sama. Nilai yang diperoleh sama karena ketiga belas pengelola IPAL Komunal menjawab pertanyaan dan mengetahui atau paham bahwa mengumpulkan dan mengelola biaya operasional dan pemeliharaan merupakan salah satu tugas pengelola. Yang menjadi perbedaan adalah urusan pengelola keuangan pada Ambarketawang dilakukan oleh bendahara RW. Pengelola di Ambarketawang belum paham bahwa mengumpulkan dan mengelola biaya operasional dan pemeliharaan merupakan salah satu tanggung jawab pengelola. Karena biaya operasional dan pemeliharaan dikelola oleh bendahara RW dan pengumpulan iuran masyarakat dilakukan oleh bendahara IPAL Komunal, hal ini menunjukkan bahwa bendahara IPAL Komunal belum sepenuhnya menjalankan tugasnya.

❖ Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan

Dilihat dari grafik pada Gambar 4.4 diketahui bahwa dari tiga belas IPAL Komunal, yang mendapatkan nilai tinggi ada delapan IPAL Komunal yaitu

Sukunan, Agung Lestari, Mendiro, Nologaten, Dukuh Berbakti, Condong Catur, Tirta Mili dan Blimbingsari. Kedelapan IPAL Komunal ini melakukan berbagai upaya peningkatan mutu pelayan seperti pengecekan bak kontrol ke rumah-rumah, mengadakan gotong royong seminggu sekali bersama masyarakat dan mengadakan perlombaan terkait IPAL.

Sedangkan, kelima IPAL Komunal mendapatkan nilai sedikit lebih rendah yaitu Ngaglik Sejahtera, Ganjuran, Kaliwaru, Mino Sehat dan Ambarketawang. Perbedaan ini dikarenakan pengelola di lima IPAL Komunal belum paham bahwa peningkatan mutu pelayanan merupakan tugas pengelola. Pengelola di Ngaglik Sejahtera dan Ganjuran belum melakukan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan. Pengelola di Mino Sehat merasa belum perlu melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan karena kondisi Komunal masih optimal. Sedangkan, Kaliwaru belum berupaya meningkatkan mutu pelayanan karena penambahan pelanggan masih jarang. Dan menurut pengelola Ambarketawang, mutu pelayanan di Ambarketawang tidak memerlukan peningkatan karena sudah maksimal. Tidak ada upaya atau rencana untuk meningkatkan mutu pelayanan pada Ambarketawang.

❖ Mengoperasikan IPAL Komunal

Dilihat dari grafik pada Gambar 4.4 diketahui bahwa ketiga belas IPAL Komunal memperoleh nilai yang sama. Nilai yang diperoleh sama karena pengelola di ketiga belas IPAL Komunal menjawab pertanyaan dan mengaku mengetahui bahwa sebagai pengelola harus paham bagaimana mengoperasikan IPAL Komunal. Pengelola di ketiga belas IPAL Komunal mengerti bagaimana mengoperasikan IPAL Komunal masing-masing.

❖ Bertanggung Jawab Pada Kerusakan

Tugas sebagai pengelola yaitu bertanggung jawab terhadap hal-hal teknis terutama kerusakan (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016). Dilihat dari grafik pada Gambar 4.4 Ambarketawang memperoleh nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan IPAL Komunal lain. Pengelola Ambarketawang belum paham bahwa kerusakan yang terjadi pada IPAL Komunal merupakan tanggung

jawab pengelola. Pada Ambarketawang apabila terjadi kerusakan teknis seperti tersumbatnya jaringan dari rumah ke IPAL Komunal, maka yang bertanggung jawab dan menangani yaitu masyarakat yang terhubung dengan sambungan tersebut.

Sedangkan, IPAL Komunal lain memperoleh nilai tertinggi yang sama karena pengelola mengetahui atau paham bahwa kerusakan pada IPAL Komunal merupakan tanggung jawab pengelola. Masalah-masalah teknis seperti tersumbatnya jaringan, kebocoran, dsb. merupakan tanggung jawab pengelola yang harus segera ditangani. Baik itu dilakukan sendiri oleh pengelola maupun dilakukan bersama masyarakat.

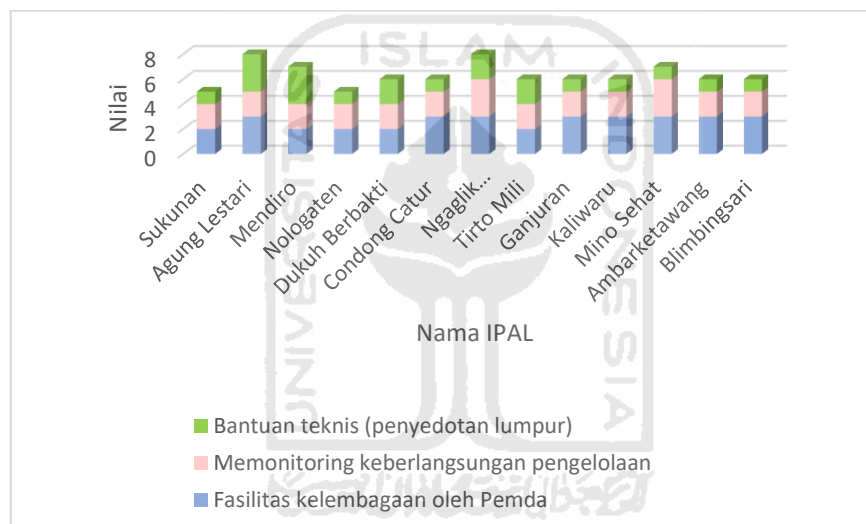
❖ Mengadakan Penyuluhan Kesehatan

Dilihat dari grafik pada Gambar 4.4 diketahui bahwa dari tiga belas IPAL Komunal, yang mendapatkan nilai tertinggi ada sebelas IPAL Komunal. Kesebelas IPAL Komunal yaitu Agung Lestari, Mendiro Nologaten, Dukuh Berbakti, Condong Catur, Ngaglik Sejahtera, Tirto Mili, Ganjuran, Kaliwaru, Mino Sehat dan Blimbingsari memperoleh nilai yang sama karena pengelola menjawab pertanyaan dan mengetahui atau paham bahwa melakukan penyuluhan tentang kesehatan merupakan salah satu tugas pengelola. Ketiga belas IPAL Komunal ini sudah pernah melakukan penyuluhan kesehatan tentang kesehatan rumah tangga dan lingkungannya kepada masyarakat di sekitar IPAL Komunal.

Sukunan memperoleh nilai yang lebih rendah, hal ini karena pengelola di Sukunan belum pernah melakukan penyuluhan kesehatan untuk masyarakat sekitar IPAL Komunal. Walaupun, pengelola tahu bahwa penyuluhan kesehatan itu penting, namun pengelola mengira yang mengadakan penyuluhan kesehatan adalah instansi lain. Pengelola IPAL Ambarketawang belum paham bahwa melakukan penyuluhan tentang kesehatan merupakan salah satu tugas pengelola. Pengelola mengira yang mengadakan penyuluhan kesehatan adalah pemerintah atau instansi lain. Karena itu, IPAL Ambarketawang belum pernah mengadakan penyuluhan kesehatan untuk masyarakat di sekitar IPAL Komunal.

4.2.3 Aspek Peran Pemerintah

Gambar 4.4 di bawah ini merupakan grafik perbandingan aspek peran pemerintah daerah di tiga IPAL Komunal dengan program SANIMAS yang ada di Kabupaten Sleman. Aspek ini terdiri dari tiga indikator antara lain adalah fasilitas kelembagaan, monitoring keberlangsungan pengelolaan dan bantuan teknis (penyedotan lumpur). Pemerintah daerah adalah pembina dan fasilitator kegiatan IPAL komunal hingga pada tahap pasca konstruksi. Pembinaan dan bantuan yang diberikan yaitu bantuan teknis atau pendanaan (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016).



Gambar 4. 5 Perbandingan Aspek Peran Pemerintah Daerah

❖ Fasilitas Kelembagaan

Dilihat dari grafik pada Gambar 4.5 diketahui bahwa dari tiga belas IPAL Komunal. Terdapat delapan IPAL Komunal yang mendapatkan nilai tinggi. Kedelapan IPAL Komunal ini adalah Agung Lestari, Condong Catur, Ngaglik Sejahtera, Ganjuran, Kaliwaru, Mino Sehat, Ambarketawang dan Blimbingsari mendapatkan pembinaan rutin dan terjadwal dari pemerintah daerah berupa pelatihan atau sosialisasi untuk pengelola. Pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan IPAL Komunal salah satu contohnya adalah terkait cara pengukuran

dan pengurasan lumpur yang benar yang disampaikan oleh AKSANSI, dapat dilihat pada Gambar 4.6. Selain itu, semua kegiatan rutin ini didanai oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman.

Sedangkan, lima IPAL Komunal lain yang memperoleh nilai lebih rendah yaitu, Sukunan, Mendiro, Nologaten, Dukuh Berbakti dan Tirto Mili. Lima IPAL Komunal ini juga mendapat pembinaan dari pemerintah daerah. Perbedaannya ada pada rutin atau tidaknya pembinaan dan siapa yang mendanai. Pengelola Mendiro dan Tirto Mili melakukan pelatihan secara rutin dengan waktu tertentu, namun pelatihan didanai oleh KSM. Untuk pengelola Sukunan, Dukuh Berbakti dan Nologaten pembinaan hanya dilakukan sekali pada awal tahap pasca konstruksi IPAL Komunal.



Sumber: (AKSANSI,2018)

Gambar 4. 6 Pelatihan Pengukuran dan Pengurasan Lumpur yang Benar

❖ Monitoring Keberlangsungan Pengelolaan

Monitoring adalah pemantauan yang dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan. Berdasarkan Permen PUPR No. 47/PRT/M/2015 monitoring dilakukan dalam jangka waktu triwulan seperti; triwulan pertama 31 Mei, triwulan kedua: 31 Agustus, triwulan ketiga: 30 November. Hal ini dilakukan agar mengetahui pencapaian dari kegiatan yang dilakukan, kemajuan pelaksanaan dan keberfungsian infrastruktur (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016). Dilihat dari

grafik pada Gambar 4.5 IPAL Komunal yang memperoleh nilai tertinggi yaitu Ngaglik Sejahtera dan Mino Sehat. Kedua IPAL Komunal ini telah dilakukan monitoring lebih dari sekali oleh pemerintah daerah. Monitoring dilakukan oleh AKSANSI yang nantinya data monitoring akan diserahkan ke DLH. Sedangkan, kesebelas IPAL Komunal yang lain yaitu Sukunan, Agung Lestari, Mendiro, Nologaten, Dukuh Berbakti, Condong Catur, Tirto Mili, Ganjuran, Kaliwaru, Ambarketawang dan Blimbingsari mendapatkan nilai lebih rendah. Sebelas IPAL Komunal ini sama-sama pernah dimonitoring oleh pemerintah, namun yang membedakan adalah hanya dilakukan sekali saja.

Monitoring atau pemantauan juga dilakukan agar dapat mengevaluasi IPAL Komunal dan dapat dijadikan pengembangan serta penyempurna dimasa mendatang. Monitoring ke lapangan dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah ataupun melalui instansi lain seperti AKSANSI untuk membantu.

❖ Bantuan Teknis

Sebagai fasilitator, pemerintah daerah memberikan bantuan teknis berupa penyedotan lumpur IPAL Komunal. Penyedotan atau pengurasan lumpur menghabiskan biaya yang tidak sedikit (AKSANSI, 2018). Salah satu tanda IPAL Komunal harus dilakukan penyedotan adalah ketika lumpur di dalam bak, tingginya sudah melebihi 50 cm. Penyedotan lumpur dengan fasilitas dari pemerintah dapat dilihat pada Gambar 4.7. Dilihat dari grafik pada Gambar 4.5 diketahui bahwa IPAL Komunal yang memperoleh nilai tertinggi pada indikator bantuan teknis berupa penyedotan lumpur dari pemerintah daerah adalah Agung Lestari. Truk dari DLH yang bertugas melakukan penyedotan lumpur rutin datang ke Agung Lestari satu hingga dua tahun sekali. IPAL Komunal yang mendapatkan nilai lebih rendah yaitu, Dukuh Berbakti, Ngaglik Sejahtera dan Tirto Mili. Ketiga IPAL Komunal ini juga melakukan penyedotan lumpur dengan truk dari DLH, namun penyedotan ini tidak rutin, pengelola tiap IPAL Komunal harus membuat surat permohonan penyedotan lumpur ke Dinas Lingkungan Hidup terlebih dahulu setiap ingin melakukan penyedotan.

Sedangkan, sembilan IPAL Komunal lain memperoleh nilai terendah dikarenakan tidak melakukan penyedotan lumpur dengan fasilitas dari DLH. Selain itu, kesembilan IPAL Komunal ini tidak pernah membuat surat ataupun permohonan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyedotan lumpur. Pada IPAL Condong Catur, pengelola memilih untuk membersihkan sendiri lumpur pada IPAL Komunal karena IPAL Komunal terletak ditengah perumahan dan persawahan dengan jalan yang kecil dan sulit untuk dilewati oleh kendaraan beroda empat.

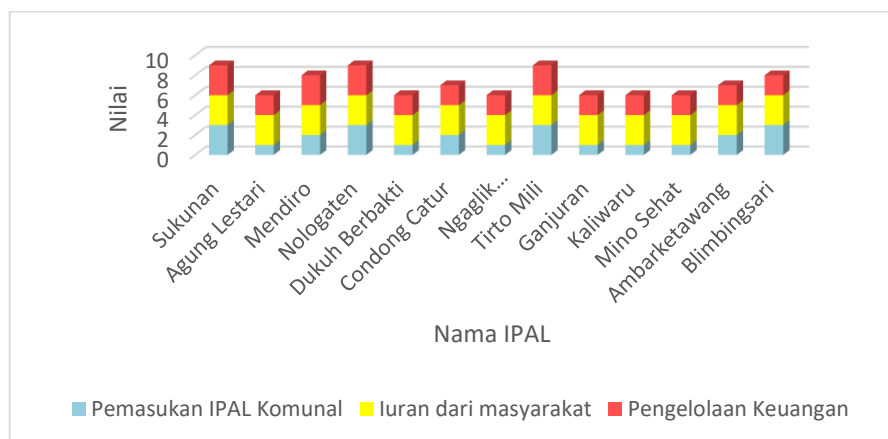


Sumber: (AKSANSI,2018)

Gambar 4. 7 Penyedotan Lumpur

4.2.4 Aspek Keuangan

Gambar 4.8 di bawah ini merupakan grafik perbandingan aspek keuangan di tiga IPAL Komunal dengan program SANIMAS yang ada di Kabupaten Sleman. Aspek ini terdiri dari dua indikator antara lain adalah pemasukan IPAL Komunal dan iuran dari masyarakat.



Gambar 4. 8 Perbandingan Aspek Keuangan

❖ Pemasukan IPAL Komunal

Dilihat dari grafik yang ada pada Gambar 4.8 diketahui bahwa IPAL Komunal yang memperoleh nilai tertinggi adalah Sukunan, Nologaten, Tirto Mili dan Blimbingsari. Keempat IPAL Komunal ini memperoleh nilai tertinggi karena sumber pemasukannya berjumlah sama dengan 3 sumber atau lebih. Ini menjadikan keempat IPAL Komunal ini memiliki simpanan dana yang lebih banyak dibandingkan dengan IPAL Komunal lain. Dana ini digunakan IPAL Komunal untuk meningkatkan kualitas dari IPAL Komunal itu sendiri, contohnya pada IPAL Tirto Mili yang baru saja merenovasi IPAL Komunalnya menjadi lebih bagus seperti yang ada pada Gambar 4.9.

Lalu, Mendiro, Condong Catur dan Ambarketawang memperoleh nilai yang lebih rendah. Ketiga IPAL Komunal ini memiliki pemasukan lebih dari 1 sumber. Selain dari iuran masyarakat, IPAL Mendiro mendapatkan pemasukan dari hasil penjualan tanaman obat, IPAL Condong Catur mendapatkan pemasukan dari kas desa dan IPAL Ambarketawang mendapatkan pemasukan dari biaya awal pelanggan baru yang ingin menyambung IPAL Komunal.

Sedangkan, enam IPAL Komunal lainnya mendapatkan nilai terendah karena sumber pemasukannya hanya dari iuran masyarakat. Hal ini menjadikan keenam IPAL Komunal tidak memiliki cukup banyak simpanan dana untuk melakukan

peningkatan kualitas IPAL Komunal yang signifikan, seperti renovasi bangunan IPAL Komunal.



Gambar 4. 9 Penambahan Tirto Mili

❖ Iuran Masyarakat

Dilihat dari grafik pada Gambar 4.8 diketahui bahwa ketiga belas IPAL Komunal memperoleh nilai tertinggi yang sama. Menurut pengelola disetiap IPAL Komunal, masyarakat membayar iuran tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama di masing-masing IPAL Komunal. Untuk besaran iurannya sendiri sangat beragam, namun berada dalam cakupan Rp 3000,00 – Rp 15000,00 /KK/bulan.

Pengadaan iuran tiap bulan ini dapat menumbuhkan rasa memiliki di masyarakat. Dana digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti honorarium pengelola, perbaikan komponen yang rusak dan biaya operasional lainnya.

❖ Pengelolaan Keuangan

Salah satu dokumen penting IPAL Komunal yaitu pembukuan keuangan. Pengelola diharuskan mampu melakukan pembukuan keuangan. Laporan keuangan

dilakukan bulanan berisi penggunaan dana dan laporan harian, ini merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban pengelola. Salah satu dokumen RKM yaitu rekening bank atas nama pengelola. Uang IPAL Komunal disimpan di bank agar lebih aman. Pembukaan rekening bank diutamakan pada bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (AKSANSI, 2016).

Dilihat dari grafik pada Gambar 4.8 diketahui bahwa IPAL Komunal yang memperoleh nilai tertinggi adalah Sukunan, Mendirol, Nologaten dan Tirto Mili. Keempat IPAL Komunal ini memperoleh nilai tertinggi karena pengelola melakukan pencatatan atau pembukuan keuangan serta memiliki rekening bank khusus untuk IPAL Komunal. Sedangkan, IPAL Komunal lain yaitu Agung Lestari, Dukuh Berbakti, Condong Catur, Ngaglik Sejahtera, Ganjuran, Kaliwaru, Mino Sehat, Ambarketawang dan Blimbingsari memperoleh nilai yang lebih rendah. Kesembilan IPAL Komunal ini sama-sama melakukan pembukuan keuangan, namun yang membedakan adalah kesembilan IPAL Komunal ini tidak memiliki rekening bank. Dilihat dari data yang didapat dalam wawancara kesembilan IPAL Komunal ini memiliki kesamaan yaitu sumber pemasukannya hanya berasal dari iuran masyarakat. Uang IPAL Komunal disimpan oleh bendahara namun tidak dengan bank khusus untuk IPAL Komunal.

4.3 Perbandingan Hasil Evaluasi IPAL Komunal

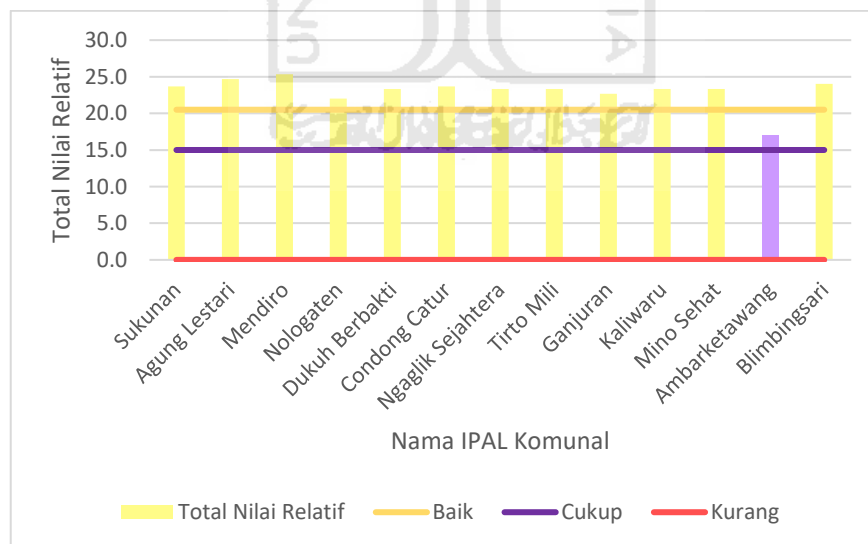
Sub bab ini berisi tentang perbandingan hasil evaluasi IPAL Komunal dilihat dari aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola berdasarkan pengetahuan TUPOKSI, peran pemerintah daerah dan keuangan berdasarkan program pengadaan yang ada di Kabupaten Sleman. Dari hasil analisis ini akan diketahui IPAL Komunal berjalan dengan baik atau tidak pada tahap pasca konstruksi berdasarkan aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola berdasarkan pengetahuan TUPOKSI, peran pemerintah daerah dan keuangan serta mengetahui aspek atau indikator yang masih perlu ditingkatkan dari setiap program pengadaan IPAL Komunal yang ada di Kabupaten Sleman.

4.3.1 Pembobotan

Hasil pembobotan dilihat dari total nilai relatif. Nilai relatif diperoleh dari perkalian antara jumlah nilai indikator dengan bobot dari masing-masing aspek. Pemberian bobot dalam penelitian mengacu pada evaluasi yang digunakan dalam Kementerian Pekerjaan Umum (2018). Aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola dan peran pemerintah daerah bobotnya 67% sedangkan aspek keuangan bobotnya 33%.

Setelah diperoleh total nilai relatif maka dapat ditentukan IPAL Komunal yang berjalan baik pada tahap pasca konstruksi yang ada pada grafik dalam Gambar 4.10. Penentuan IPAL Komunal menggunakan ketentuan teoritis dengan mengkategorikan menjadi tiga yaitu, Baik (76%-100%), Cukup (56%-75%) dan Kurang (< 55%) (Arikunto, 2013) yaitu:

- a. Baik : > 20.5
- b. Cukup : $15 < N \leq 20.5$
- c. Kurang : ≤ 15



Gambar 4. 10 Total Nilai Relatif

Dari grafik pada Gambar 4.10 Dapat disimpulkan bahwa dua belas dari tiga belas IPAL Komunal berjalan dengan baik pada tahap pasca konstruksi berdasarkan aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan. Hal ini ditunjukkan karena kedua belas IPAL Komunal mendapatkan total nilai relatif > 20.5 . Sedangkan, Ambarketawang adalah IPAL Komunal yang memperoleh total nilai relatif 17 dan mendapatkan kategori Cukup.

4.3.2 Analisis Hasil Evaluasi dan Solusi

Berdasarkan dari data yang telah didapatkan dan dilakukan *scoring* serta pembobotan, didapatkan hasil bahwa dari tiga belas IPAL Komunal yang dijadikan sebagai lokasi penelitian terdapat dua belas IPAL Komunal yang mendapatkan kategori Baik (Tabel 4.10). Setelah melakukan *scoring* berdasarkan aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan, peneliti menemukan aspek yang perlu ditingkatkan pada setiap program pengadaan. Aspek yang perlu ditingkatkan pada setiap program adalah sebagai berikut:

a. Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)

Pada program SANIMAS aspek yang perlu ditingkatkan adalah peran pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan karena pemerintah tidak melakukan monitoring secara rutin untuk semua IPAL Komunal. Selain itu, pembinaan pengelola seperti pelatihan rutin yang dibiayai oleh pemerintah belum dilakukan, hanya ada sekali pelatihan saat awal tahap pasca konstruksi. Fasilitas penyedotan lumpur juga belum digunakan oleh semua IPAL Komunal.

Peningkatan aspek peran pemerintah dapat dilakukan dengan melakukan monitoring sesuai dengan Permen PUPR No. 47/PRT/M/2015 yaitu tiga bulan sekali dengan bantuan AKSANSI. Tetap melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola pada tahap pasca konstruksi. Selain itu, bantuan berupa biaya maupun teknis seperti penyedotan lumpur dapat diberikan ke setiap IPAL Komunal.

b. *Urban Sanitation Rural Infrastructure (USRI)*

Pada program USRI aspek yang perlu ditingkatkan adalah aspek kelembagaan pengelola. Hal ini ditunjukkan dari adanya IPAL Komunal yang tidak memenuhi ketentuan jumlah pengelola seperti yang diisyaratkan oleh Kementerian PU yaitu paling sedikit 5 orang. Selain itu, pengelola tidak rutin mengadakan pelaporan kepada masyarakat. Beberapa IPAL Komunal juga tidak memiliki SOP pemeliharaan.

Peningkatan aspek kelembagaan pengelola pada program USRI dapat dilakukan dengan cara pengadaan jadwal rutin pelaporan masyarakat yang dapat dilakukan sebulan sekali bersama pengumpulan iuran. Pengelola membuat laporan kegiatan mingguan untuk masyarakat berisi kemajuan pelaksanaan pembangunan fisik dan keuangan IPAL Komunal (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016). Pengelola IPAL Komunal membuat SOP pemeliharaan seperti pada Gambar 4.3 dan diletakkan pada bangunan IPAL Komunal agar pengelola serta masyarakat dapat melihat dan mengetahui SOP pemeliharaan yang baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada program DAK aspek yang perlu ditingkatkan adalah aspek peran pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan IPAL Komunal tidak mendapatkan fasilitas penyedotan lumpur dari pemerintah daerah. Selain itu, terdapat IPAL Komunal yang baru sekali dilakukan monitoring.

Peningkatan aspek peran pemerintah dapat dilakukan dengan melakukan monitoring sesuai dengan Permen PUPR No. 47/PRT/M/2015 yaitu tiga bulan sekali dengan bantuan AKSANSI. Selain itu, pengelola dapat membuat permohonan penyedotan lumpur kepada pemerintah agar IPAL Komunal diberikan fasilitas atau bantuan berupa penyedotan lumpur.

d. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)

Pada program SLBM terdapat IPAL Komunal yang mendapatkan kategori Cukup (Gambar 4.10). Aspek yang perlu ditingkatkan pada program ini yaitu aspek kelembagaan pengelola dan kinerja pengelola. Hal ini dapat dilihat dari data yang

didapatkan yaitu terdapat IPAL Komunal yang tidak rutin melakukan kepada masyarakat masyarakat. Selain itu, dokumentasi IPAL Komunal hilang dan tidak diketahui oleh pengelola. Salah satu pengelola IPAL Komunal mengaku tidak memiliki SOP pemeliharaan. Pada aspek kinerja pengelola ditunjukkan dengan kurang pemahannya pengelola dengan TUPOKSI sesuai dengan yang disebutkan dalam Petunjuk Pelaksanaan DAK (2016) dan belum dilakukannya TUPOKSI seperti penyuluhan kesehatan tentang kesehatan rumah tangga dan lingkungannya kepada masyarakat di sekitar IPAL Komunal.

Peningkatan aspek kelembagaan pengelola pada program SLBM dapat dilakukan dengan cara pengadaan jadwal rutin pelaporan masyarakat yang dapat dilakukan sebulan sekali bersama pengumpulan iuran. Pengelola membuat laporan kegiatan mingguan untuk masyarakat berisi kemajuan pelaksanaan pembangunan fisik dan keuangan IPAL Komunal (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016). Pengelola IPAL Komunal membuat SOP pemeliharaan seperti pada Gambar 4.3 agar pengelola serta masyarakat dapat melihat dan mengetahui SOP pemeliharaan yang baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Untuk dokumentasi sebaiknya ditanyakan kembali pada pihak terakhir yang menyimpannya (menurut pengelola penanggung jawab konstruksi). Dokumentasi IPAL Komunal sebaiknya disimpan dan memiliki penanggung jawab yaitu salah satu pengelola.

Sedangkan untuk peningkatan aspek kinerja pengelola, karena masih kurangnya pemahaman pengelola mengenai TUPOKSI sebagai pengelola. Sebaiknya, pemerintah atau instansi terkait seperti AKSANSI memberikan sosialisasi terkait TUPOKSI pengelola agar dapat menjalankan pengelolaan dengan baik sesuai dengan yang tertera dalam Petunjuk Pelaksanaan DAK (2016). Selain itu, evaluasi terhadap kinerja pengelola juga sebaiknya dilakukan, hal ini berguna agar pelaksanaan pengelolaan IPAL Komunal dapat berjalan sesuai dengan tujuan pengadaan IPAL Komunal.

Berdasarkan hasil evaluasi IPAL Komunal dengan program pengadaan yang berbeda yaitu SANIMAS, USRI, DAK dan SLBM, dapat ditemukan program pengadaan yang berjalan paling baik di Kabupaten Sleman. Hal ini dapat dilihat

dari pembagian jumlah total nilai relatif IPAL Komunal program pengadaan yang sama dengan jumlah IPAL Komunalnya. Tabel 4.2 menunjukkan nilai yang didapatkan tiap program pengadaan berdasarkan dari aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan. Berdasarkan Tabel 4.2 SANIMAS merupakan program pengadaan yang mendapatkan nilai tertinggi. Ini dikarenakan IPAL Komunal dengan program SANIMAS berjalan dengan baik dilihat dari aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan. Sedangkan, nilai terendah diperoleh oleh program pengadaan SLBM, hal ini disebabkan karena terdapat IPAL Komunal yang aspek kelembagaan pengelola dan kinerja pengelola kurang baik.

Tabel 4. 3 Nilai Program Pengadaan

Program	Nama IPAL	Total Nilai Relatif	Jumlah	Nilai Program
SANIMAS	Sukunan	23.7	73.7	24.6
	Agung Lestari	24.7		
	Mendiro	25.3		
USRI	Nologaten	22.0	138.4	23.1
	Dukuh Berbakti	23.3		
	Condong Catur	23.7		
	Ngaglik Sejahtera	23.3		
	Tirto Mili	23.3		
	Ganjuran	22.7		
DAK	Kaliwaru	23.3	46.7	23.3
	Mino Sehat	23.3		
SLBM	Ambarketawang	17.0	41.0	20.5
	Blimbingsari	24.0		

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang telah dilakukan pada ketiga belas IPAL Komunal yang ada di Kabupaten Sleman, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ditemukan empat jenis program pembangunan IPAL Komunal di Kabupaten Sleman. Empat program ini yaitu, SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat), USRI (*Urban Sanitation Rural Infrastructure*), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat).
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja program pembangunan yang berbeda ditemukan bahwa SANIMAS adalah program pembangunan yang terbaik di Kabupaten Sleman. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi kinerja berdasarkan aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan yang mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan program lain. Sedangkan, nilai terendah diperoleh oleh program SLBM, hal ini disebabkan karena terdapat IPAL Komunal yang pada aspek kelembagaan pengelola dan kinerja pengelola kurang baik.
3. Setiap program pembangunan memiliki kinerja pasca konstruksi yang berbeda. Dari hasil evaluasi kinerja ditemukan aspek yang masih perlu ditingkatkan pada setiap program pembangunan. Pada program SANIMAS dan DAK aspek yang perlu ditingkatkan yaitu aspek peran pemerintah daerah. Pada program USRI aspek yang perlu ditingkatkan yaitu aspek kelembagaan pengelola. Sedangkan, untuk program SLBM aspek kelembagaan pengelola dan kinerja pengelola yang perlu ditingkatkan.

5.2 Saran

Setelah melakukan pengamatan dan analisis mengenai kondisi IPAL Komunal di Kabupaten Sleman dengan program pengadaan yang berbeda-beda, maka ada beberapa saran yang diajukan antara lain:

1. Pemerintah daerah seharusnya tetap mengawasi dan mendampingi keberlangsungan IPAL Komunal walaupun pembangunan telah selesai. Memberikan fasilitas dan bantuan kepada IPAL Komunal baik teknis maupun pendanaan. Selain itu, melakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh, baik dalam hal pengolahan IPAL Komunal maupun kelembagaan pengelola.
2. Pemerintah daerah sebaiknya mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada pengelola IPAL Komunal agar pengelola paham tentang tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola IPAL Komunal.
3. Sebagai pengelola IPAL Komunal, sebaiknya paham mengenai tugas pokok dan fungsi sebagai pengurus, seperti yang ada di dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Petunjuk Pelaksanaan DAK (2016).
4. Penelitian berikutnya, untuk dapat mengetahui perbandingan secara spesifik berdasarkan aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan, mencari informan dari pihak pemerintah daerah dan masyarakat agar semua data dapat dibandingkan. Turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan bukti dokumentasi yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- AKSANSI. 2016. **Pertemuan KSM/KPP dan Pembagian Hadiah Sanitasi Award Kabupaten Sleman**. <https://aksansi.org/pertemuan-ksm-kpp-pembagian-hadiah-sanitasi-award-kab-sleman-2016/> (Accessed 29 Agustus 2020).
- AKSANSI. 2018. **Pelatihan Pengukuran dan Penyedotan Lumpur Tinja Kabupaten Sleman**. <https://aksansi.org/pelatihan-pengukuran-dan-penyedotan-lumpur-tinja-kab-sleman/>(Accessed 11 September 2020).
- Al Rasyid, G. T. R. 2020. **Evaluasi Kondisi IPAL Komunal di Kabupaten Sleman**. Tugas Akhir. Teknik Lingkungan, Universitas Islam Indonesia.
- Arikunto, S. 2013. **Suatu Pendekatan Praktik**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2019. **Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta, 2017**. <https://slemankab.bps.go.id/statictable/2019/06/26/446/jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-2017.html> (Accessed 9 September 2020).
- Bahar, E., Utomo, S. & Zaman, B. 2017. **Sustainability study of domestic communal wastewater treatment plant in Surabaya City**. *IOP Conference Series Earth and Environmental Science* .
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2014. **Petunjuk Pelaksanaan DAK SLBM**. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2016. **Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)**. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2017. **Petunjuk Teknis SANIMAS**. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Dinas Lingkungan Hidup. 2019. **Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta**. <https://drive.google.com/file/d/1QNYhNLgGv5aupxu3tO7YU3PjbwmHIC3X/view> (Accessed 27 Februari 2020).
- Hendrawan, D. 2008. **Kualitas Air Sungai Ciliwung Ditinjau dari Parameter Minyak dan Lemak**. *Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2019. **Prasarana dan Sarana Sanitasi**. Jakarta.
- Kemertian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. **Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya**. *Surat Edaran*. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2017. **Laporan Kinerja Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman 2016**. Jakarta.

- Kurniasih, R. 2019. **Evaluasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Ciparigi Kota Bogor.**
- Marsono, B. D. & Trisnawati, A. 2012. **Evaluasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di Kota Kediri.**
- Praditya, R. K. 2016. **Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal di Kampung Seni Nitiprayan, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.** Tugas Akhir. Universitas Islam Indonesia.
- T.M., G. J. & Soedjono, E. S. 2015. **Evaluasi Pengelolaan IPAL Komunal di Kabupaten Gresik.**



LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

FORM WAWANCARA DARING

Tanggal :

Nama Responden :

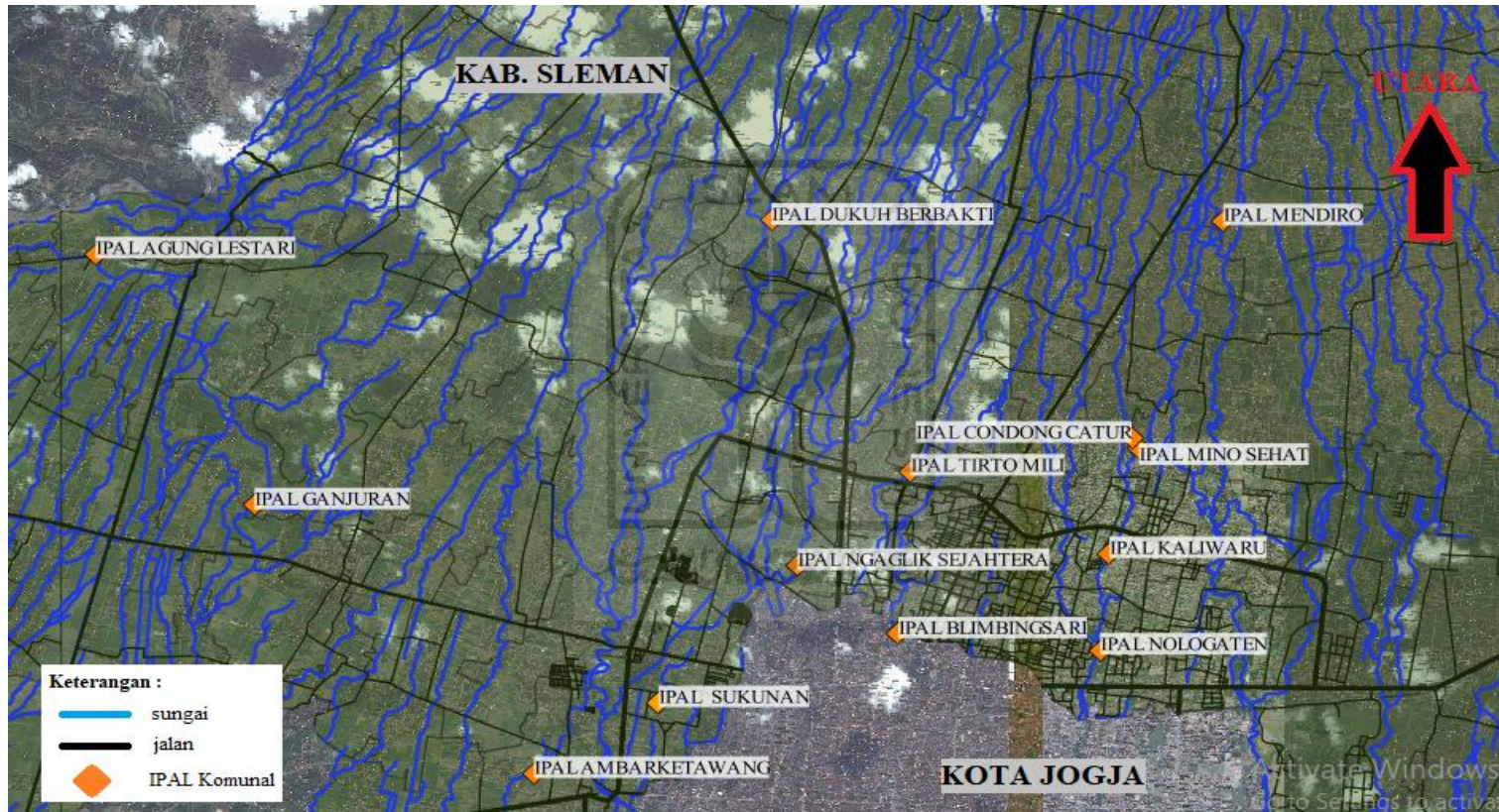
Nama IPAL :

1. Tahun berapa IPAL di bangun?
2. Tahun berapa IPAL mulai beroperasi?
3. Apakah IPAL masih beroperasi sampai saat ini?
 - Iya
 - Tidak, (tahun terakhir beroperasi)
4. Siapa yang mengusulkan pembangunan IPAL?
5. Pernahkah dilakukan penyuluhan kesehatan (terkait IPAL) untuk masyarakat?
 - Pernah
 - Tidak pernah
6. Berapa luas lahan IPAL?
7. Berapakah jumlah KK terlayani IPAL saat ini?
8. Teknologi pengolahan apa yang digunakan pada IPAL?
 - *ABR (Anaerobic Baffled Reactor)*
 - *RBC (Rotating Biological Contactor)*
 - *Lainnya*
9. Adakah keluhan warga terhadap IPAL
10. Berapa biaya berlangganan IPAL bagi pelanggan setiap bulannya?
11. Apakah pelanggan taat dalam waktu pembayaran biaya berlangganan?
 - Taat

- Tidak taat
12. Apakah dilakukan pembukuan keuangan?
- Iya
 - Tidak
13. Apakah memiliki rekening Bank untuk menyimpan uang IPAL Komunal?
- Iya
 - Tidak, mengapa?
14. Berapa jumlah pengelola IPAL Komunal?
15. Apakah ada pelatihan untuk operator/pengurus IPAL?
- Ada, 1x diawal
 - Ada, rutin dengan waktu tertentu
 - Tidak ada
16. Siapa yang memberikan pelatihan?
17. Siapa yang mendanai pelatihan?
18. Apakah semua pengelola diharuskan paham bagaimana cara mengoperasikan dan memelihara IPAL?
- Iya
 - Tidak
19. Siapa yang mengumpulkan dan mengelola dana untuk biaya operasional dan pemeliharaan?
20. Dari mana saja pemasukan IPAL tiap bulannya?
- Iuran pelanggan
 - Donatur
 - Kas desa
 - KSM/KPP
 - Pemerintah
 - Lainnya
21. Adakah upaya pengelola untuk meningkatkan mutu pelayanan dan jumlah pemanfaatan? Jika ada jelaskan
22. Adakah SOP dalam pemeliharaan unit IPAL?

23. Apakah pernah terjadi kerusakan unit pengolahan? Apa yang rusak?
Bagaimana solusinya?
24. Permasalahan apa yang sering muncul pada IPAL Komunal?
- Bau
 - Tersumbat
 - Lainnya
 - Tidak ada
25. Pernahkah dilakukan monitoring IPAL?
- Pernah
 - Tidak pernah
26. Siapa yang melakukan monitoring?
- DLH
 - AKSANSI
 - Penelitian kunjungan (mahasiswa, dll)
 - Lainnya
27. Dimana dokumen-dokumen IPAL disimpan?
(Perencanaan pola penanganan IPAL, perencanaan komponen IPAL, dan perencanaan konstruksi, dokumen lampiran)
28. Siapa yang bertanggung jawab dalam menyimpan dokumen-dokumen IPAL Komunal?
- Ketua
 - Sekretaris
 - Lainnya
29. Apakah ada pelaporan kegiatan kepada masyarakat? Jika ada apa saja yang dilaporkan? Kapan?
30. Apakah ada pelaporan IPAL kepada instansi penanggung jawab daerah? Jika ada, apa saja yang dilaporkan? Kapan?

Lampiran 2 Titik Lokasi Penelitian



Lampiran 3 Penilaian IPAL Komunal Tiap Indikator

Program	Nama IPAL	Kelembagaan pengelola				Kinerja Pengelola					Peran Pemda			Keuangan		
		1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	2e	3a	3b	3c	4a	4b	4c
SANIMAS	IPAL Sukunan	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	3	3	3
	IPAL Agung Lestari	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	1	3	2
	IPAL Mendiro	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3
USRI	IPAL Nologaten	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	3	3	3
	IPAL Dukuh Berbakti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	3	2
	IPAL Condong Catur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	2	3	2
	IPAL Ngaglik Sejahtera	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	1	3	2
	IPAL Tirta Mili	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3
	IPAL Ganjuran	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	1	3	2
DAK	IPAL Kaliwaru	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	1	3	2
	IPAL Mino Sehat	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	1	1	3	2
SLBM	IPAL Ambarketawang	2	2	1	1	2	2	3	2	1	3	2	1	2	3	2
	IPAL Blimbingsari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	2

Keterangan:

1a: Struktur Pengelola

1b: Pelaporan tentang IPAL Komunal kepada masyarakat

1c: Dokumentasi pengelolaan

1d: Adanya SOP pemeliharaan

2a: Yang mengumpulkan dan mengelola biaya operasional dan pemeliharaan

2b: Upaya peningkatan mutu pelayanan

2c: Pengurus paham mengoperasikan IPAL Komunal

2d: Yang bertanggung jawab pada kerusakan

2e: Penyuluhan kesehatan

3a: Fasilitas kelembagaan oleh pemerintah daerah

3b: Memonitoring keberlangsungan pengelolaan

3c: Bantuan teknis (penyedotan lumpur)

4a: Pemasukan IPAL Komunal

4b: Iuran dari masyarakat

4c: Pengelolaan Keuangan

Lampiran 4 Profil IPAL Komunal

1. IPAL Sukunan

Nama KSM	: Pelangi Manunggal Warga
Ketua IPAL	: Pak Haryadi
Alamat IPAL	: Sukunan, RW 19, Banyuraden, Gamping
Tahun Beroperasi	: 2008
Status IPAL	: Berfungsi
Teknologi	: RBC
<u>Pengumpulan Data</u>	
Narasumber	: Pak Haryadi
Metode	: Wawancara daring



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017

2. IPAL Agung Lestari

Nama KSM	: Agung Lestari
Ketua IPAL	: Pak Erik
Alamat IPAL	: Ngento Ento Sumberarum Moyudan

Tahun Beroperasi : 2015
Status IPAL : Berfungsi
Teknologi : ABR
Pengumpulan Data
Narasumber : Bu Suharti
Metode : Wawancara daring



3. IPAL Mendiro

Nama KSM : Ngudi Mulyo
Ketua IPAL : Pak Prapto
Alamat IPAL : Dukuh Mendiro, Desa Sukoharjo, Kec. Ngaglik,
Sleman
Tahun Beroperasi : 2016
Status IPAL : Berfungsi
Teknologi : RBC + Grafel filter
Pengumpulan Data
Narasumber : Pak Prapto

Metode : Wawancara dan survey lokasi secara langsung



4. IPAL Dukuh Berbakti

Nama KSM : Dukuh Berbakti

Ketua IPAL : Pak Apriyanto

Alamat IPAL : Dukuh, Tridadi, Sleman

Tahun Beroperasi : 2015

Status IPAL : Berfungsi

Teknologi : ABR

Pengumpulan Data

Narasumber : Pak Murdiyanto

Metode : Wawancara daring



5. IPAL Tirto Mili

Nama KSM : Tirto Mili

Ketua IPAL : Pak Imam

Alamat IPAL : Dusun Jongkang RW 35, Desa Sariharjo, Kec.

Ngaglik, Sleman

Tahun Beroperasi : 2015

Status IPAL : Berfungsi

Teknologi : RBC

Pengumpulan Data

Narasumber : Pak Imam

Metode : Wawancara dan survey lokasi secara langsung





6. IPAL Nologaten

Nama KSM : Nologoten Bersih

Ketua IPAL : Pak Tarmono

Alamat IPAL : Dukuh Nologaten, Desa Caturtunggal, Kec. Depok,
Sleman

Tahun Beroperasi : 2014

Status IPAL : Beroperasi

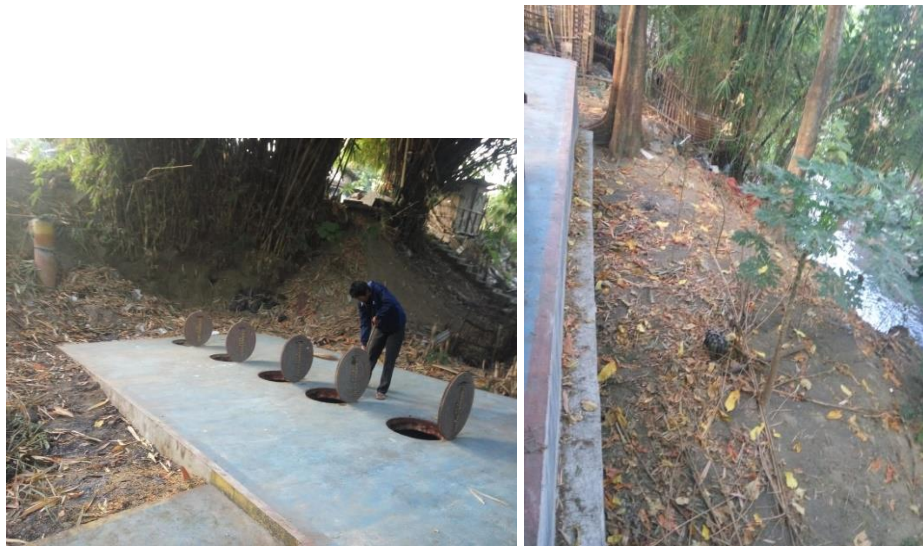
Teknologi : ABR

Pengumpulan Data

Narasumber : Pak Tarmono

Metode : Wawancara daring





7. IPAL Ganjuran

Nama KSM : Ngudi Saras
 Ketua IPAL : Pak Budi Riyanta
 Alamat IPAL : Bletuk, Ganjuran, Sidorejo, Godean
 Tahun Beroperasi : 2010
 Status IPAL : Berfungsi
 Teknologi : ABR

Pengumpulan Data

Narasumber : Pak Budi Riyanta
 Metode : Wawancara daring

(Dokumentasi tidak didapatkan)

8. IPAL Condong Catur

Nama KSM : Sumber Sehat
 Ketua IPAL : Pak Puput Tri
 Alamat IPAL : Desa Condongcatur, Kec. Depok, Sleman
 Tahun Beroperasi : 2012
 Status IPAL : Berfungsi

Teknologi : RBC

Pengumpulan Data

Narasumber : Pak Puput Tri

Metode : Wawancara daring dan pengamatan ke lokasi



9. IPAL Ngaglik Sejahtera

Nama KSM : Ngaglik Sejahtera

Ketua IPAL : Pak Waljiyo

Alamat IPAL : Ngaglik, RT 02/RW 06, Sinduadi, Mlati

Tahun Beroperasi : 2012

Status IPAL : Berfungsi

Teknologi : ABR

Pengumpulan Data

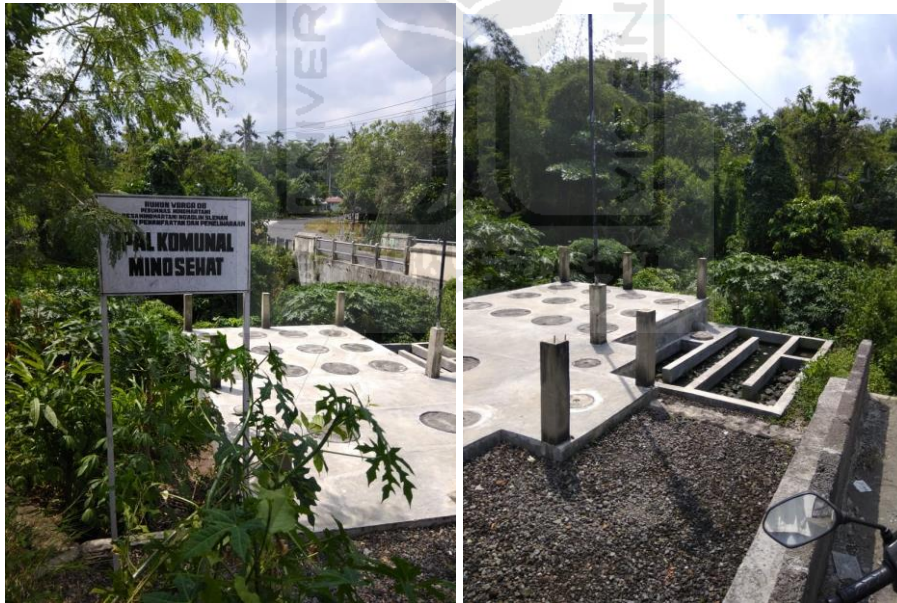
Narasumber : Pak Waljiyo

Metode : Wawancara daring

(Dokumentasi tidak didapatkan)

10. IPAL Mino Sehat

Nama KSM : Mino Sehat
Ketua IPAL : Pak Rifai
Alamat IPAL : Dukuh Plosokuning V, Perumahan Minomartani
RW 06, Kec. Ngaglik, Sleman
Tahun Beroperasi : 2019
Status IPAL : Beroperasi
Teknologi : ABR
Pengumpulan Data
Narasumber : Pak Rifai
Metode : Wawancara daring



11. IPAL Kaliwaru

Nama KSM : Amanah Tiga Lima
Ketua IPAL : Pak Sriyono

Alamat IPAL : Dukuh Kaliwaru RW 35, Desa Condongcatur, Kec.
Depok, Sleman

Tahun Beroperasi : 2018

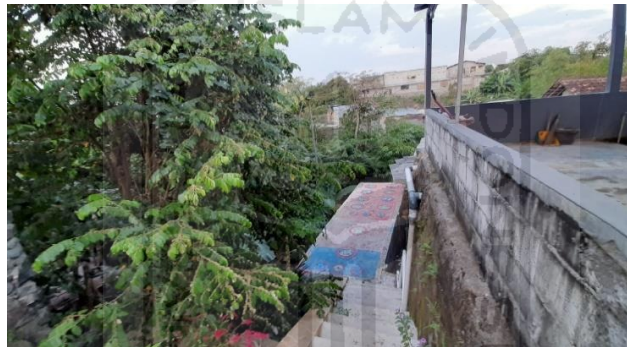
Status IPAL : Berfungsi

Teknologi : ABR

Pengumpulan Data

Narasumber : Pak Sriyono

Metode : Wawancara daring



12. IPAL Ambarketawang

Nama KSM : Gedong

Ketua IPAL : Pak Sukirmin

Alamat IPAL : Bodeh, Ambarketawang, Gamping

Tahun Beroperasi : 2012
Status IPAL : Berfungsi
Teknologi : ABR
Pengumpulan Data
Narasumber : Pak Sumijan
Metode : Wawancara daring
(Dokumentasi tidak didapatkan)

13. IPAL Blimbingsari

Nama KSM : Bagas
Ketua IPAL : Pak Agus
Alamat IPAL : Dukuh Blimbingsari, Desa Condongcatur, Kec.
Depok

Tahun Beroperasi : 2010
Status IPAL : Berfungsi
Teknologi : ABR
Pengumpulan Data
Narasumber : Pak Agus
Metode : Wawancara daring
(Dokumentasi tidak didapatkan)



RIWAYAT HIDUP

Alifia Farah Pramudita atau yang biasa dipanggil Fia lahir di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 26 Maret 1998, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Budi Rahayu dan Ibu Sri Utami. Penulis menempuh pendidikan TK O kecil di TK Yapis Waena-Jayapura, lalu melanjutkan TK O besar di TK Aisyiah Abepura-Jayapura. Kemudian menempuh pendidikan dasar di SD Muhammadiyah Abepura-Jayapura, lalu melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah Abepura-Jayapura. Melanjutkan pendidikan di Como Secondary College, Perth, lalu melanjutkan pendidikan kembali di SMP Muhammadiyah Abepura-Jayapura. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah keatas di SMA Negeri 1 Jayapura.

Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah keatas, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Indonesia. Penulis diterima sebagai mahasiswa Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan melalui jalur Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB) tahun 2016. Dibulan Oktober 2019 penulis melaksanakan Kerja Praktik di PT Hutama Karya Persero pada proyek konstruksi oleh PT. Pelindo III. Kemudian dari bulan Januari hingga Juli, penulis melaksanakan penelitian bertema IPAL Komunal di Kabupaten Sleman untuk menyelesaikan studi di Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.